

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN TUBAN 2021



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KABUPATEN TUBAN 2021



<https://tubankab.bps.go.id>

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN TUBAN 2021

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN TUBAN 2021

*Peoples Welfare Indicator of
Tuban Regency 2021*

ISBN :
Katalog BPS : 4102004.3523
No Publikasi : 35235.2130
Ukuran buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : xvi + 102

Naskah :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan oleh :
@ BPS Kabupaten Tuban

Dicetak oleh
BPS Kabupaten Tuban

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/
atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan
komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik



<http://www.kubankab.go.id>

Kata Pengantar

KATA PENGANTAR

Pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah selama ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah menjalankan program pembangunan yang berkesinambungan, menyeluruh, terarah dan terpadu. Agar program tersebut bisa berjalan sesuai yang direncanakan, maka perlu dievaluasi terhadap sejumlah indikator yang mencerminkan taraf kesejahteraan rakyat.

Publikasi “Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tuban 2021” ini menyajikan indikator-indikator yang dimaksud. Data yang digunakan bersumber dari BPS, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Kesehatan. Data yang berasal dari BPS, utamanya bersumber dari hasil Susenas, Sakernas, SDKI dan Sensus Penduduk.

Hasil pengolahan data dari berbagai sumber tersebut akan disajikan dalam bentuk analisis indikator kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, serta indikator kemiskinan dan indikator sosial lainnya.

Kami berharap semoga dengan kehadiran publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pengguna data, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dalam melakukan evaluasi program pembangunan kesejahteraan rakyat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini dan semoga kehadiran publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data secara luas.

Tuban, Desember 2021

BPS Kabupaten Tuban
Kepala



Eko Mardiana, SE



<http://pubbinzab.ppj.go.id>

Daftar Isi

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar gambar	xiii
1. Kependudukan	3
1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan rasio Jenis kelamin	4
1.2 Kepadatan dan Persebaran Penduduk	6
1.3 Angka Beban Ketergantungan	8
1.4 Fertilitas	11
2. Kesehatan	19
2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk	20
2.2 Tingkat Imunitas dan Gizi balita	23
2.3 Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan	25
3. Pendidikan	33
3.1 Tingkat Partisipasi Sekolah	34
3.2 Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan	37
3.3 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	38
3.4 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	39
3.5 Kualitas Pelayanan Pendidikan	41
4. Ketenagakerjaan	49
4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	49
4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	52
4.3 Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan	55
4.4 Jumlah Jam Kerja	57
4.6 Upah/Gaji/Pendapatan Bersih	57

	Halaman
5. Taraf dan Pola Konsumsi	61
5.1 Pengeluaran Rumah Tangga	63
5.2 Ketimpangan Pengeluaran Penduduk	65
5.3 Konsumsi Energi dan Protein	66
6. Perumahan dan Lingkungan	73
6.1 Kualitas Rumah Tangga	74
6.2 Fasilitas Rumah Tinggal	75
6.3 Status Kepemilikan Rumah Tinggal.....	76
7. Kemiskinan	83
7.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Tuban	84
7.2 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan	85
7.3 Karakteristik Pendidikan Anggota Rumah Tangga	86
7.4 Karakteristik Ketenagakerjaan Anggota Rumah Tangga	89
7.5 Karakteristik Perumahan Rumah Tangga	89
8. Sosial Lainnya	95
8.1 Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kegiatan	95
8.2 Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi	96
8.3 Akses Kredit Usaha dan Penerima Pelayanan Kesehatan	98
8.4 Tindak Kejahatan	99

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Kependudukan	
Tabel 1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan rasio Jenis kelamin, Kabupaten Tuban 2016-2020	5
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kecamatan di Kabupaten Tuban, 2020	7
Tabel 1.3 Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Tuban, 2020	9
Tabel 1.4 Ukuran Fertilitas , 2010 dan 2020	13
4. Ketenagakerjaan .	
Tabel 4.1 Penduduk Kabupaten Tuban Usia 15 Tahun ke atas menurut Jenis Kegiatan Utama, 2017 - 2020	50
Tabel 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Tuban, 2017-2020 (persen)	54
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut kelompok Lapangan Usaha, di Kabupaten Tuban, 2017 – 2020 (ribu orang)	55
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut Status Pekerjaan Utama, di Kabupaten Tuban, 2017 –2020 (ribu orang)	56
5. Taraf dan Pola Konsumsi	
Tabel 5.1 Nilai Pengeluaran makanan Penduduk menurut Jenis Pengeluaran, di Kabupaten Tuban, 2020 (rupiah).....	64
Tabel 5.2 Nilai Pengeluaran Non makanan Penduduk menurut Jenis Pengeluaran, di Kabupaten Tuban, 2020 (rupiah).....	65
6. Perumahan dan Lingkungan	
Tabel 6.1 Prosentase Rumah Tangga menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, di Kabupaten Tuban, 2016- 2020	75
Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga menurut beberapa Fasilitas Perumahan, di Kabupaten Tuban, 2016- 2020	76
Tabel 6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal, di Kabupaten Tuban, 2016- 2020	77

7. Kemiskinan

Tabel 7.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Tuban , 2016-2020	84
Tabel 7.2 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Kabupaten Tuban, 2016 - 2020	86
Tabel 7.3 Karakteristik Pendidikan Penduduk Miskin Kabupaten Tuban, 2016-2020	87

<https://tubankab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Kependudukan

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tuban, 2016 - 2020	4
Gambar 1.2 Laju Pertumbuhan dan Rasio Penduduk Kecamatan di Kabupaten Tuban, 2020	5
Gambar 1.3 Kepadatan Penduduk Kabupaten Tuban 2016 - 2020 (Jiwa per KM ²)	6

2. Kesehatan

Gambar 2.1 Umur Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Tuban, 2015 – 2020	21
Gambar 2.2 Angka Kesakitan Persentase yang mengeluh kesehatan dan Rata-rata Lama rawat inap (Hari) Penduduk Kabupaten Tuban, 2020	22
Gambar 2.3 Angka Kesakitan (%) dan Rata-rata Lama sakit (Hari), 2019-2020	23
Gambar 2.4 Persentase Bayi usia 1—23 bulan lama pemberian ASI Kabupaten Tuban, 2020	24
Gambar 2.5 Persentase Balita yang pernah di Imunisasi menurut jenis Imunisasi di Kabupaten Tuban, 2020	25
Gambar 2.6 Persentase wanita usia 15—49 tahun yang pernah kawin dan melahirkan anak pada dua tahun terakhir menurut tempat melahirkan di Kabupaten Tuban, 2020	26
Gambar 2.7 Persentase wanita usia 15—49 tahun yang pernah kawin dan melahirkan anak pada dua tahun terakhir menurut penolong Kelahiran Terakhir di Kabupaten Tuban, 2020	26

3. Pendidikan

Gambar 3.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Tuban Menurut Kelompok Umur , 2018—2020,	35
Gambar 3.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Tuban, 2020,	36
Gambar 3.3 Perbandingan persentase penduduk usia 15 tahun keatas menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Kabupaten di Pantura dan Provinsi Jawa Timur 2020	37
Gambar 3.4 Rata—rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Tuban , 2016—2020	38
Gambar 3.5 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tuban 2016 –2020	40
Gambar 3.6 Angka Harapan Lama Sekolah menurut Gender di Kabupaten Tuban, 2019 – 2020	40

	Halaman
Gambar 3.7 Rasio Murid Guru menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tuban, 2016 – 2020	41
Gambar 3.8 Rasio Murid Sekolah menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tuban, 2016 –2020	42
4. Ketenagakerjaan	
Gambar 4.1 Jumlah Angkatan Kerja, Kabupaten Tuban 2017-2020 (ribuan Orang)	50
Gambar 4.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tuban , 2017-2020 ...	51
Gambar 4.3 Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Kabupaten Tuban, 2020	52
Gambar 4.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tuban, 2017-2020	53
Gambar 4.5 Rata — rata Upah/Gaji Bersih Buruh/Karyawan di Kabupaten Tuban (ribuan rupiah) 2017—2020	57
5. Taraf dan Pola Konsumsi	
Gambar 5.1 Persentase Pengeluaran perkapita Sebulan menurut jenis pengeluaran di Kabupaten Tuban 2017—2020	63
6. Perumahan dan Lingkungan	
Gambar 6.1 Persentase Rumah Tangga menurut Status kepemilikan Rumah tinggal di Kabupaten Tuban , 2020	77
7. Kemiskinan	
Gambar 7.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tuban, 2016-2020	84
8. Sosial Lainnya	
Gambar 8.1 Persentase Penduduk Kabupaten Tuban menurut Kegiatan, 2020	95
Gambar 8.2 Persentase Penduduk Kabupaten Tuban menurut Penggunaan HP, 2020	96
Gambar 8.3 Persentase Penduduk KabupatenTuban yang Memanfaatkan Internet, 2020 ..	97
Gambar 8.4 Persentase Penduduk yang memanfaatkan Internet menurut Tujuannya di Kabupaten Tuban , 2020	97
Gambar 8.5 Persentase Rumah Tangga Penerima Kridit Usaha menurut Jenis Kridit Usaha di Kabupaten Tuban, 2020	98



<http://www.militerkab.bps.go.id>

1

KEPENDUDUKAN



1. KEPENDUDUKAN

Dalam statistik Nasional, data kependudukan merupakan informasi penting dalam proses pembangunan, karena dalam konteks pembangunan, penduduk berperan sebagai subyek sekaligus obyek dalam pembangunan. Oleh karena itu perhatian terhadap penduduk bukan hanya pada sisi jumlah tetapi juga sisi kualitas. Penduduk yang berkualitas merupakan modal bagi pembangunan dan diharapkan mampu mengatasi berbagai akibat dari dinamika kependudukan.

Semakin bertambahnya penduduk mengandung konsekuensi penyediaan seluruh hajat hidupnya juga bertambah. Dapat dibayangkan bila jumlah penduduk bertambah dua kali lipat maka kebutuhan sandang, pangan, perumahan, fasilitas kesehatan dan seluruh kebutuhan juga harus disediakan dua kalinya.

Dengan demikian tidak terpenuhinya kebutuhan hidup dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Mulai kemiskinan, rawan pangan, pemukiman, kesehatan dan pendidikan yang dapat memicu gangguan keamanan. Oleh karena itu dalam pembangunan kependudukan sangat penting untuk dapat mengendalikan kelahiran dan mempertajam kualitas penduduk melalui program—program jangka pendek, menengah maupun panjang.

Sisi demografi lain yang penting adalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk. Karena komposisi penduduk yang timpang akan menyebabkan daya dukung alam semakin berat. Masalah kepadatan penduduk dapat mengakibatkan masalah lingkungan, salah satu program klasik pemerintah dalam mengurangi kepadatan dikota adalah transmigrasi. Dengan program ini dapat mengurangi beban perkotaan dan membuka kesempatan produksi di pedesaan di luar Jawa. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

Pertumbuhan penduduk yang tak terkendali dan kualitas SDM yang buruk dapat menjadi boomerang pada masa bonus demografi, dapat menjadi petaka demografi

1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

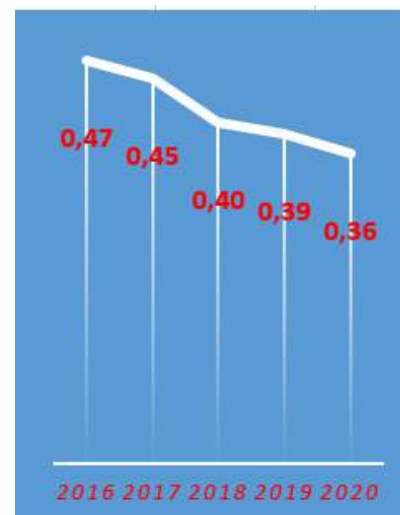
Jumlah penduduk Kabupaten Tuban pada tahun 2020 berdasarkan Proyeksi Penduduk 2010-2035 tercatat sebanyak 1.177 ribu jiwa. Jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan sekitar 4.226 jiwa bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2019 yang mencapai 1.172 ribu jiwa. Bila dibandingkan dengan tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Tuban saat ini mengalami peningkatan sekitar 5,00 persen. Dengan kata lain, selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir jumlah penduduk Kabupaten Tuban telah mengalami penambahan penduduk sebesar 56.106 jiwa.

Dalam analisis kependudukan, banyak faktor yang perlu diperhatikan dan dianalisis sehingga dapat memberikan informasi akurat dalam rangka menentukan berbagai keputusan yang akan diambil selama proses perumusan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penduduk pada dasarnya merupakan target utama yang ingin dituju oleh setiap proses pembangunan, yaitu berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ditinjau dari laju pertumbuhan penduduk tiap tahunnya, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tuban condong berfluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam hal pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tuban telah menunjukkan adanya keberhasilan. Keberhasilan ini ditunjukkan pula dengan terus menurunnya laju pertumbuhan penduduk selama lima tahun terakhir yaitu 0,47 persen pada tahun 2016, turun menjadi 0,45 persen pada tahun 2017 dan kembali turun pada tahun 2018 dan 2019 masing—masing menjadi 0,40 persen dan 0,39 persen dan pada tahun 2020 laju pertumbuhannya sebesar 0,36 persen.

Sedangkan dari 20 kecamatan, pada periode tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk di 7 kecamatan berada diatas laju pertumbuhan penduduk kabupaten. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi dicapai oleh Kecamatan Jenu (1,02 persen), diikuti Kecamatan Palang (0,93 persen), Kecamatan Merakurak (0,71 persen), Kecamatan Plumpang (0,67 persen), Kecamatan Semanding (0,51 persen) Kecamatan Grabagan (0,51 persen) dan Kecamatan Rangel

Gambar 1.1
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tuban 2016 - 2020

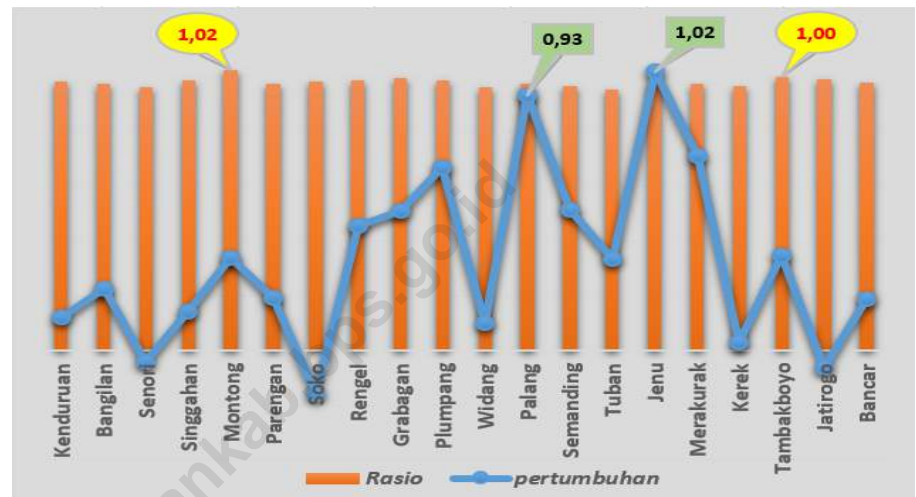


Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten Tuban 2010-2035

(0,46 persen) Sementara itu, 13 kecamatan mengalami laju pertumbuhan penduduk di bawah angka kabupaten. kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terendah dicapai oleh Kecamatan Senori (-0,04 persen), diikuti Kecamatan Jatirogo (-0,06 persen) dan Kecamatan Soko (-0,16 persen).

Gambar 1.2

Laju Pertumbuhan dan Rasio Penduduk kecamatan di Kabupaten Tuban 2020



Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten Tuban 2010-2035

Ditinjau dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin penduduk perempuan, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Tuban pada tahun 2020 sebesar 97,60 persen. Ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 97 penduduk laki-laki. Artinya jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Tuban lebih sedikit dari pada jumlah penduduk perempuan.

Tabel 1.1

Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin, Kabupaten Tuban, 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk (ribu Jiwa)	Laju Pertumbuhan per Tahun (%)	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	1,158	0.47	97.58
2017	1,164	0.45	97.62
2018	1,168	0.40	97.65
2019	1,172	0.39	97.41
2020	1.177	0.36	97.60

Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten Tuban 2010-2035

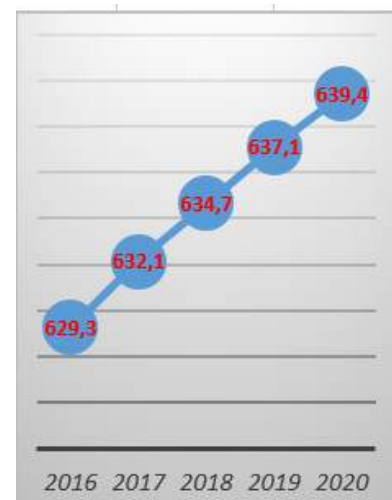
Rasio jenis kelamin ditinjau berdasarkan kecamatan, dari 20 kecamatan yang berada di Kabupaten Tuban, ada dua kecamatan yang rasio jenis kelaminnya mencapai 100 persen yaitu Kecamatan Montong sebesar 102,2 persen sedangkan 19 kecamatan yang lain rasio jenis kelamin dibawah 100 persen. Dan dari 19 kecamatan tersebut hanya 13 kecamatan yang rasio jenis kelamin di atas 97 persen, sisanya sebanyak 6 kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin di bawah 97 persen. Rasio jenis kelamin terkecil terdapat di kecamatan Tuban (95,3) kemudian diikuti oleh Kecamatan Senori (96,0), Kecamatan Widang (96,1) dan Kecamatan Semanding (96,2). Sementara itu kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin tertinggi pada tahun 2020 selain Kecamatan Montong adalah Kecamatan Tambakboyo (99,8), kemudian Kecamatan Grabagan (99,3), Kecamatan Jatirogo (98,8), Kecamatan Rengel (98,7) dan Kecamatan Singgahan (98,6).

1.2. Kepadatan dan Persebaran Penduduk

Kepadatan penduduk Kabupaten Tuban masih timpang, begitu pula penduduk antar kota dan desa menjadi salah satu persoalan yang masih harus dihadapi oleh Kabupaten Tuban. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan (*densitas*) penduduk, tekanan penduduk akan mempengaruhi daya dukung infratrastur, lingkungan dan sosial di suatu wilayah.

Ada beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, di wilayah lain masih ada wilayah yang hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi masyarakat setempat. Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada tekanan sosial dan lingkungan. Besarnya kepadatan penduduk berdampak pada penyediaan lahan untuk pemukiman, fasilitas pendidikan dan kesehatan dan lain—lain. Sebaliknya wilayah dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit akan memunculkan persoalan pemanfaatan sumber daya alam terkait dengan kekurangan tenaga kerja padahal wilayah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Gambar 1.3
Kepadatan Penduduk
Kabupaten Tuban, 2016 - 2020
(Jiwa per km²)



Sumber : Proyeksi Penduduk
Kabupaten Tuban 2010-2035

Kepadatan penduduk di Kabupaten Tuban dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang disebabkan oleh kelahiran maupun migrasi masuk, walaupun demikian pertumbuhannya semakin lama makin melandai, Pada tahun 2016 kepadatan penduduk Kabupaten Tuban 629,3 jiwa per km², meningkat menjadi 632,1 per jiwa km² pada tahun 2017, kepadatan penduduk Kabupaten Tuban ini terus meningkat hingga pada tahun 2020 kepadatan penduduk Kabupaten Tuban mencapai 639,4 jiwa per km².

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk
Kecamatan di Kabupaten Tuban, 2020

Wilayah / Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas (KM ²)	Kepadatan (Penduduk per KM ²)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten	1.177.016	1.840,79	639,41
Kenduruan	27.042	85,73	315,43
Bangilan	45.169	77,27	584,56
Senori	38.782	78,39	494,73
Singgahan	40.363	79,05	510,60
Montong	53.903	147,98	364,26
Parengan	53.351	114,45	466,15
Soko	78.608	96,88	811,40
Rengel	59.932	58,52	1.024,13
Grabagan	38.901	73,79	527,19
Plumpang	80.551	86,52	931,01
Widang	48.621	107,99	450,24
Palang	85.704	72,70	1.178,87
Semanding	108.355	120,99	895,57
Tuban	86.080	21,29	4.043,21
Jenu	56.413	81,61	691,25
Merakurak	59.193	103,77	570,42
Kerek	65.644	136,55	480,73
Tambakboyo	40.499	72,97	555,01
Jatirogo	53.032	111,98	473,58
Bancar	56.873	112,36	506,17

Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten Tuban
2010-2035

Densitas penduduk menurut kecamatan pada tahun 2020 bervariasi, ada 3 kecamatan yang kepadatan penduduknya berada di atas 1.000 jiwa per km², kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Tuban 4.043,21 jiwa per km², Kecamatan Palang 1.178,87 jiwa per km² dan Kecamatan Rengel sebesar 1.024,3 jiwa per km². Tingginya kepadatan penduduk yang tinggal di kecamatan Tuban, Kecamatan Palang dan Kecamatan Rengel didorong oleh lengkapnya infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibanding dengan kecamatan yang lain.

Masalah ketimpangan distribusi penduduk bila dilihat menurut kecamatan, di Kabupaten Tuban terjadi ketimpangan distribusi penduduk desa dan kota. Ketimpangan distribusi penduduk pada umumnya juga disebabkan oleh migrasi masuk (*in migration*) yang terjadi karena tarikan aktifitas ekonomi dimana di kota lebih dinamis dibanding desa, sehingga penduduk lebih banyak tinggal di kota. Pada umumnya kepadatan penduduk yang tinggi berada di kota. Akan tetapi di Kabupaten Tuban kepadatan penduduk yang berada diatas rata—rata kabupaten ada tujuh kecamatan, diantaranya Kecamatan Tuban yang merupakan ibu kota Kabupaten, Palang, Rengel, Plumpang, Semanding, Soko dan Kecamatan Jenu, sebagaimana tergambar dalam table 1.2 diatas.

1.3. Angka Beban Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) menunjukkan beban yang di tanggung penduduk produktif terhadap penduduk belum produktif dan tidak produktif. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk mendukung hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Begitu sebaliknya bila prosentase rendah.

Pengendalian penduduk yang baik juga dapat ditunjukkan dengan perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Semakin kecil angka beban ketergantungan akan memberikan

kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan output dan kreatifitasnya.

Dependensy ratio cenderung menurun setiap tahun. Pada periode 2016-2020 angka beban ketergantungan setiap tahun berfluktuatif cenderung menurun, Pada tahun 2020 angka beban ketergantungan Kabupaten Tuban sebesar 42,89 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 43 penduduk usia tidak produktif, (di bawah umur 15 tahun dan 65 tahun ke atas).

Tabel 1.3
Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan
Kabupaten Tuban, 2020

Wilayah / Kecamatan	Komponen Penduduk (%)			Angka Beban Ketergantungan (Jiwa)
	0 - 14 Tahun	15 - 64 Tahun	65 Tahun +	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten	22,78	69,98	7,23	42,89
Kenduruan	22,25	68,82	8,93	45,30
Bangilan	24,63	68,12	7,25	46,80
Senori	25,03	66,40	8,57	50,60
Singgahan	23,37	69,53	7,11	43,83
Montong	20,81	71,25	7,93	40,34
Parengan	22,14	68,94	8,92	45,06
Soko	22,15	70,01	7,84	42,84
Rengel	23,01	69,01	7,98	44,91
Grabagan	20,73	71,91	7,36	39,07
Plumpang	23,71	69,11	7,18	44,69
Widang	22,95	69,48	7,56	43,92
Palang	24,61	69,52	5,87	43,84
Semanding	23,33	70,62	6,05	41,61
Tuban	23,71	70,64	5,65	41,56
Jenu	23,74	69,47	6,78	43,94
Merakurak	21,10	71,28	7,62	40,28
Kerek	20,41	71,02	8,57	40,81
Tambakboyo	22,84	70,45	6,71	41,95
Jatirogo	22,21	70,00	7,79	42,87
Bancar	21,44	71,99	6,57	38,90

Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten Tuban
2010-2035

Angka ketergantungan yang rendah dapat mendorong kesejahteraan penduduk yang lebih baik, karena produksi dapat meningkat, dapat mengembangkan investasi. Pada periode dimana angka *Dependency Ratio* terendah merupakan kesempatan emas mendapatkan peluang ekonomi tertinggi. Periode ini diproyeksikan akan terjadi tahun 2020-2030. Namun sebaliknya akan menjadi bencana ekonomi jika sebagian besar dari penduduk muda tidak berkualitas, karena akan menimbulkan masalah sosial dan dapat berkembang menjadi masalah ekonomi dan keamanan. Mereka dikatakan usia produktif tapi tidak dapat termanfaatkan tenaganya karena tidak terserap di pasar kerja.

Dampak langsung menurunnya pertumbuhan penduduk adalah menurunnya proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun). Pada tabel 1.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 ada sebanyak 22,78 persen penduduk Kabupaten Tuban yang berusia muda (0-14 tahun) dan terdapat sebelas kecamatan yang jumlah penduduk usia 0—14 tahun lebih tinggi dari rata—rata penduduk usia muda di Kabupaten Tuban. Di antaranya Kecamatan Senori 25,03 persen, Kecamatan Bangilan 24,64 persen, Kecamatan Palang 24,61 persen, Kecamatan Jenu 23,75 persen, Kecamatan Tuban 23,72 persen, Kecamatan Plumpang 23,71 persen, Kecamatan Singgahan 23,37 persen, Kecamatan Semanding 23,33 persen, Kecamatan Rengel 23,02 persen, Kecamatan Widang 22,96 persen dan Kecamatan Tambakboyo 22,85 persen.

Struktur umur penduduk Kabupaten Tuban pada tahun 2020 masih didominasi oleh penduduk usia produktif yang mencapai 69,98 persen, jika ditinjau menurut kecamatan ada sepuluh kecamatan dengan jumlah penduduk usia produktif diatas rata —rata kabupaten. Jumlah penduduk usia produktif tertinggi berada di Kecamatan Bancar 71,99 persen kemudian Kecamatan Grabagan 71,90 persen, Kecamatan Merakurak 71,29 persen, Kecamatan Montong 71,26 persen, Kecamatan Kerek 71,02 persen, Kecamatan Tuban 70,64 persen, Kecamatan Semanding 70, 61 persen, Kecamatan Tambakboyo 70,45 persen, Kecamatan Soko 70,01 persen dan Kecamatan Jatirogo 69,99 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di

Kabupaten Tuban merupakan modal dasar yang sangat potensial untuk pembangunan. Sementara itu, proporsi penduduk usia lanjut 65 tahun ke atas yang jumlahnya kurang dari 6,00 persen hanya terdapat di dua kecamatan antara lain Kecamatan Palang dan Tuban.

1.4. Fertilitas

Fertilitas diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita, yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi yaitu kesehatan pada ibu khususnya dan perempuan pada umumnya dimasa usia subur (15-49 tahun).

Fertilitas atau kelahiran, kematian (mortalitas dan perpindahan penduduk (migrasi in/out) merupakan kejadian yang dapat memengaruhi pertumbuhan penduduk di suatu wilayah. Angka fertilitas yang tidak terkendali dapat menyebabkan peningkatan pertumbuhan penduduk. Terlebih lagi bilah angka kematian yang rendah. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan beban pembangunan dalam pembiayaan dan penyediaan infrastruktur. Disamping itu ledakan jumlah penduduk dapat memicu masalah ekonomi sosial dan lingkungan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur fertilitas adalah Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*), Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate/CBR*), Angka Reproduksi Kasar (*Gross Reproductive Rate/GRR*), dan Angka Reproduksi Neto (*Net Reproductive Rate/NRR*).

TFR adalah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. Indikator TFR berguna sebagai instrument pengukur tingkat keberhasilan program KB. Sehingga dapat dibandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan kependudukan.

TFR membantu para perencana program pembangunan kependudukan untuk mengendalikan kelahiran dengan meningkatkan rata—rata usia kawin, penggunaan alat kontrasepsi, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak. Semua bertujuan akhir menekan angka pertumbuhan penduduk.

Berdasarkan Proyeksi Penduduk 2010-2035 sejak tahun 2010 tidak mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu dari 2,04 menjadi hanya 1,97 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan oleh seorang wanita hingga selesai masa reproduksinya (usia 15-49 tahun) adalah 2 anak dalam rentang waktu tersebut.

GRR adalah banyaknya bayi perempuan yang dilahirkan oleh perempuan selama masa reproduksi. Ukuran ini tidak memperhitungkan kemungkinan bayi perempuan meninggal sebelum mencapai masa reproduksinya. GRR selama kurun waktu 2010 - 2020 relative tetap pada angka 0,9—1,0.

NRR adalah jumlah bayi perempuan yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya, dan dapat menggantikan ibunya untuk bereproduksi dengan mengikuti pola fertilitas dan mortalitas ibunya. NRR memperhitungkan kemungkinan si bayi perempuan meninggal sebelum mencapai akhir masa reproduksinya. NRR merupakan ukuran kemampuan suatu populasi untuk menggantikan dirinya (*replacement level*). NRR bernilai satu berarti suatu populasi dapat menggantikan dirinya dengan jumlah yang sama. NRR bernilai lebih dari satu berarti bahwa suatu populasi dapat menggantikan dirinya dengan jumlah yang lebih besar, sementara NRR kurang dari satu berarti populasi tidak mampu menggantikan dirinya dengan jumlah yang sama. NRR selama kurun waktu 2010-2020 relatif tetap, yaitu dari 1,0 menjadi hanya 0,9.

CBR adalah banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Indikator CBR digunakan untuk mengetahui tingkat kelahiran di suatu daerah tertentu pada waktu tertentu. CBR selama kurun waktu 2010-2020 mengalami penurunan dari 16,40 pada tahun 2010 menjadi 14,10 pada tahun 2020. Angka ini dikatakan sebagai Angka Kelahiran Kasar karena pembagiannya adalah seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan.

Pada saat ini CBR dirasakan cukup ideal, namun diduga angka ini terus melandai turun. Umumnya dengan berkembang hingga majunya suatu wilayah, angka CBR relatif rendah. Jika tidak terkendali

dengan baik akan terjadi ketimpangan yang cukup menyolok terhadap komposisi penduduk muda dan tua. Penduduk usia muda semakin sedikit dan komposisi penduduk lebih didominasi oleh penduduk usia tua.

Tabel 1.4
Ukuran Fertilitas, Tahun 2010 dan 2020

Ukuran Fertilitas	2010	2105
(1)	(2)	(3)
<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	2,04	1,91
<i>Gross Reproductive Rate (GRR)</i>	0,90	1,00
<i>Net Reproductive Rate (NRR)</i>	1,00	0,90
<i>Crude Birth Rate (CBR)</i>	16,40	14,10

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia



**Badan Pusat Statistik
Kabupaten Tuban**



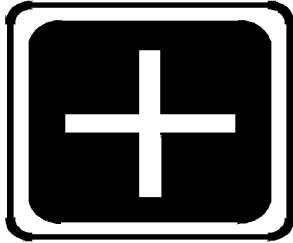
RASIO JENIS KELAMIN PENDUDUK TAHUN 2020 SEBESAR 97,60 PERSEN

artinya terdapat 97 penduduk laki-laki dari
setiap 100 penduduk perempuan



2

KESEHATAN



2. KESEHATAN

Salah satu prioritas pembangunan nasional adalah Bidang Kesehatan. Sebagai variabel pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan. Derajat kesehatan diukur dengan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk melihat capaian program pemerintah.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah melalui program untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diantaranya mempermudah akses terhadap pelayanan kesehatan, seperti puskesmas, pustu, dan lain-lain. Sasaran utama pembangunan aspek Kesehatan adalah meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH) sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan pemerintah. Capaian UHH didapatkan dengan menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu, menurunkan prevalensi gizi buruk serta kurang guzi, dan paling utama menurunkan Angka Kematian Bayi.

Disamping sarana Kesehatan, program—program pemerintah telah dilakukan untuk target—target diatas, diantaranya terus meningkatkan kompetensi sumber daya tenaga kesehatan dan mendistribusikan hingga pelosok desa, dengan pelayanan yang baik dan jempit bola sehingga pelayanan kesehatan dapat merata dan mudah diakses. Pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau diyakini dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat seperti memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, polindes dan posyandu yang didukung dengan penyediaan alkes dan obat-obatan yang memadai. Dalam meningkatkan derajat kesehatan hendaknya program—program pemerintah yang terkait dengan kesehatan tersebut secara langsung dapat diakses public secara luas dan murah, terjangkau hingga pelosok pelosok desa di kabupaten Tuban.

2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Beberapa indikator penting yang digunakan untuk mengukur kondisi tingkat kesehatan masyarakat antara lain Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kelahiran Kasar (AKK) Umur Harapan Hidup (UHH) dan Angka Kesakitan (*Morbidity*).

Mengapa bayi menjadi sasaran penting untuk diperhatikan kesehatannya, karena bayi merupakan penduduk yang paling rentan mendapat masalah kesehatan bila terjadi perubahan terhadap kondisi keluarga/lingkungan. Disamping itu bayi adalah tumpuhan harapan penerus generasi bangsa. Diantara banyak masalah kesehatan bayi yang paling utama adalah stunting, kesakitan hingga kematian.

Indikator Angka Kematian Bayi (AKB) dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka kelangsungan hidup bayi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah, terutama di sektor kesehatan. Semakin rendah angka kematian bayi, maka semakin besar peluang kelangsungan hidup bayi.

Angka Kematian Kasar (AKK) yang terus menurun dan diproyeksikan menurun pada tahun 2020 hingga 14,1 per 1.000 penduduk dalam kurun waktu persatu tahun. Dengan demikian makin terlihat kombinasi angka kelahiran kasar yang menurun, diikuti AKB juga makin rendah selama satu dekade maka dapat dikatakan peluang kelangsungan hidup bayi bukan saja makin besar namun juga makin berkualitas.

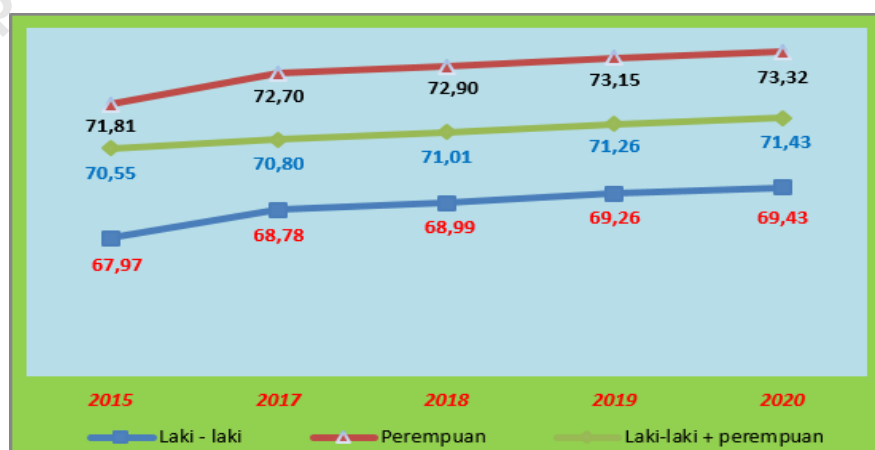
Program Pemerintah dengan intervensi aktif untuk menjangkau wilayah-wilayah pedesaan dengan mengaktifkan puskesmas, pustu, Pos kesehatan, dan posyandu dengan melibatkan kader dan kalangan masyarakat merupakan strategi yang jitu, karena dapat menimbulkan kepedulian masyarakat terhadap balita. Balita (0-5) tahun sangat penting untuk diperhatikan, karena merupakan fase krusial untuk pertumbuhan dan perkembangan otak dan fisiknya. Kualitas manusia sangat ditentukan bagaimana mutu hidupnya saat balita.

Hasil pembangunan aspek kesehatan pada akhirnya dapat

dilihat dari capaian umur harapan hidup penduduk dari suatu wilayah. Umur Harapan Hidup (UHH) pada suatu umur x adalah rata—rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x pada suatu tahun tertentu, dalam situasi *mortalitas* yang berlaku di lingkungan masyarakat. Mudah-mudahan mengakses pada fasilitas kesehatan, kemampuan memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mengakses pendidikan dan mempunyai keleluasaan dalam mengakses sumber ekonomi dapat meningkatkan Umur Harapan Hidup.

Definisi Umur Harapan Hidup (UHH) pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata—rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. UHH merupakan salah satu alat untuk mengukur kinerja pemerintah dalam capaian pembangunan bidang kesehatannya. Namun demikian capaian UHH yang meningkat tidak berarti banyak tanpa disertai program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, pengentasan kemiskinan, kecukupan gizi/kalori dan program lain, termasuk pendidikan.

Gambar 2.1
Umur Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Tuban,
2015 – 2020



Sumber : BPS Kabupaten Tuban

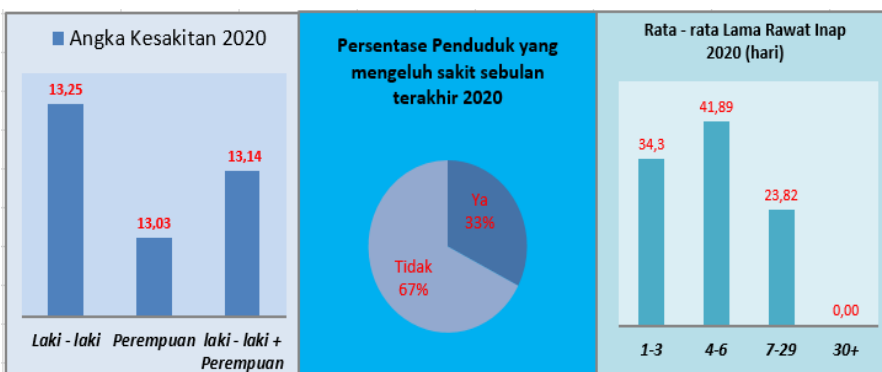
Penghitungan UHH dilakukan dengan cara tidak langsung menggunakan aplikasi Mort Pack ini dilakukan karena catatan Registrasi Kematian Penduduk di Kabupaten Tuban belum begitu mumpuni. Rata - rata UHH di Tuban selama 5 tahun terakhir (2016—2020) cenderung rneningkat yaitu dari 70,55 tahun (tahun 2015) menjadi 71,43 tahun (tahun 2020).

UHH menurut gender masyarakat Kabupaten Tuban, menunjukkan bahwa perempuan lebih lama umur harapan hidupnya dibanding laki—laki. UHH penduduk laki—laki hingga tahun 2020 belum menyentuh umur 70 tahun, sementara penduduk perempuan sejak lama sudah diatas 70 tahun.

Angka Kesakitan atau *Morbiditas* yaitu adanya gangguan/ keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dan lain—lain.

Logikanya Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit). Dari hasil Susenas tahun 2020 penduduk Kabupaten Tuban yang mempunyai keluhan kesehatan mencapai 13,14 persen (reversi survei sebulan yang lalu). Bila dibedakan menurut jenis kelamin penduduk laki —laki memiliki prosentase lebih tinggi (13,25 persen) dibanding penduduk perempuan (13,03 persen) yang memiliki keluhan kesehatan. Dari 13,14 persen yang mengalami keluhan kesehatan tersebut 40,38 persen mengaku terganggu aktifitas kehidupan sehari—hari. Inilah yang disebut angka kesakitan, dengan demikian angka kesakitan Kabupaten Tuban sebesar 13,14 persen.

Gambar 2.2
Angka Kesakitan Presentase yang mengeluh kesehatan dan Rata-rata lama rawat Inap Penduduk Kabupaten Tuban, Tahun 2020



Sumber : Susenas 2020, BPS Kabupaten Tuban

Gambar 2.3
Angka Kesakitan (%)
dan
Rata-rata Lama Sakit (Hari),
2019 - 2020



Sumber: BPS Kabupaten Tuban

Sementara penduduk Kabupaten Tuban yang sakit dan melakukan rawat inap sebanyak 3,89 persen, dari 3,89 persen tersebut sebanyak 89,04 persen diantaranya melakukan rawat inap di rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta, sedangkan hasil susenas tercatat sebesar 34,3 persen melakukan rawat inap sebanyak 1—3 hari. Penduduk yang melakukan rawat inap antara 4—6 hari sebanyak 41,89 persen, Persentase ini merupakan jumlah terbanyak penduduk yang melakukan rawat inap, selanjutnya antara 7—29 hari sebanyak 23,82 persen dan yang melakukan rawat inap lebih dari 30 hari sebanyak 0,00 persen.

Dalam mengatasi keluhan kesehatan yang dialami, ada sekitar 35,14 persen penduduk yang berobat jalan dan sisanya 64,86 persen tidak melakukan berobat jalan. Berbagai alasan penduduk tidak berobat jalan dalam mengatasi keluhan kesehatannya, yang paling besar adalah karena mereka mengobati sendiri keluhan kesehatannya yaitu sebesar 57,73 persen dan berikutnya adalah karena merasa tidak perlu untuk berobat jalan karena keluhan kesehatannya yang dirasakan dianggap biasa dan tidak perlu berobat jalan yaitu sebesar 39,53 persen, Penduduk yang berobat jalan kebanyakan mendatangi tempat praktek dokter/bidan yaitu sebesar 72,75 persen dan berikutnya yang banyak di datangi adalah Puskesmas/pustu sebesar 16,51 persen.

2.2 Tingkat Imunitas dan Gizi Balita

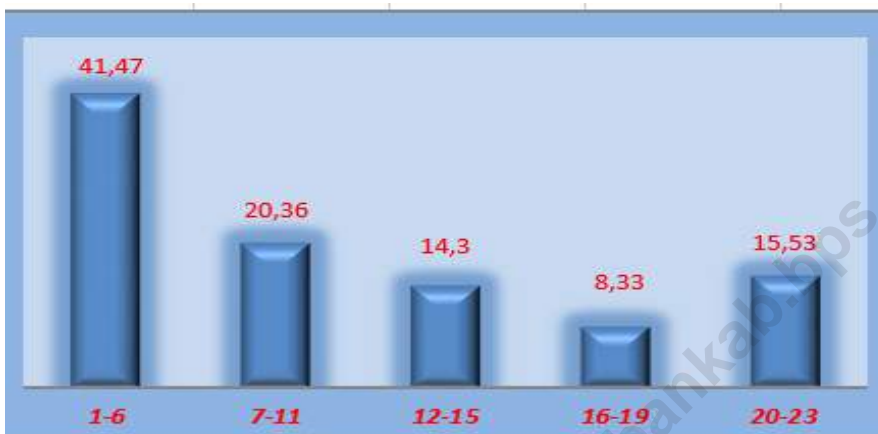
Pertumbuhan anak pada masa emas atau umur 0—5 tahun sangat mempengaruhi saat mereka menjadi manuia dewasa. Beberapa factor yang dapat mempengaruhi kesehatan balita dimulai saat dalam kandungan, tenaga penolong pada saat lahir, imunisasi dan pemberian ASI.

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) dua bulan pertama (*kolostrum*) setelah dilahirkan bagi bayi sangat diperlukan, karena ASI merupakan sumber makanan terbaik serta memenuhi kebutuhan gizi dan mengandung zat yang memberikan kekebalan tubuh terhadap serangan penyakit ringan. Oleh sebab itu pemerintah menganjurkan agar seorang ibu dapat memberikan ASI kepada bayi sebagai asupan utamanya, tanpa memberi makanan pendamping.

Berdasarkan Susenas tahun 2020 diketahui bahwa sebanyak 97,58 persen anak dibawah usia dua tahun di Kabupaten Tuban pernah menerima ASI dan 2,42 persen tidak pernah merasakan ASI. Dari sekitar 97,58 persen baduta yang menerima ASI sebagian besar menerima ASI selama kurang dari satu tahun yaitu sebanyak 61,83 persen sedangkan yang menerima ASI hingga usia 23 bulan yaitu sebanyak 15,53 persen.

Gambar 2.4

**Prosentase Bayi Usia 1—23 bulan lama pemberian ASI
Kabupaten Tuban, Tahun 2020**



Sumber : Susenas 2020, BPS Kabupaten Tuban

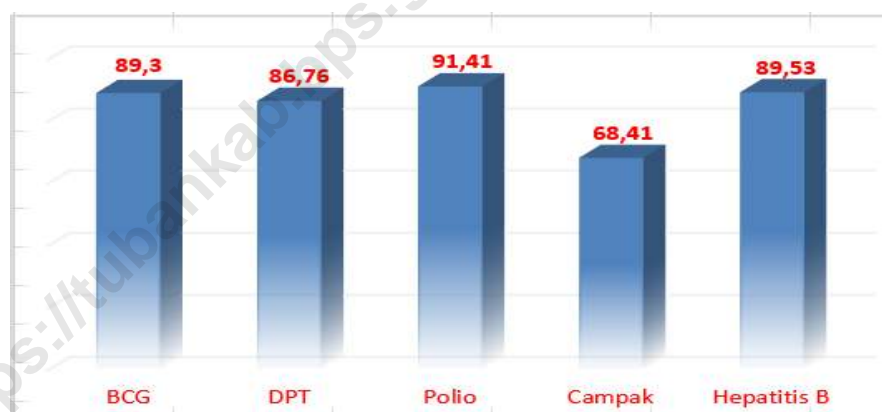
Pemberian Imunisasi juga sangat penting disamping ASI, Imunisasi merupakan prosedur pencegahan penyakit menular yang diberikan kepada anak sejak masih bayi hingga remaja. Melalui program itu tubuh diperkenalkan dengan bakteri atau virus tertentu yang sudah dilemahkan atau dimatikan dengan tujuan untuk merangsang system imun guna membentuk antibodi. Antibodi yang terbentuk setelah imunisasi berguna untuk melindungi tubuh dari serangan mikroorganisme tersebut karena sudah membentuk kekebalan.

Bayi yang baru lahir rentan terhadap beberapa jenis penyakit, walaupun sejak lahir bayi memiliki antibodi saat masih dalam kandungan, namun kekebalan ini hanya dapat bertahan beberapa minggu atau bulan saja, setelah itu bayi akan rentan terhadap beberapa jenis penyakit dan perlu memproduksi antibodinya sendiri. Pemberian ASI saja belum cukup untuk membangun kekebalan alami, maka diperkuat dengan imunisasi, sehingga system kekebalan tubuh anak akan siap untuk menghadapi penyakit menular tertentu di masa yang akan datang, sesuai dengan jenis vaksin yang diberikan. Imunisasi

secara tepat pada balita bermanfaat dalam memberikan kekebalan terhadap penyakit-penyakit tertentu, sehingga melalui imunisasi diharapkan dapat mengurangi kematian bayi dan balita.

Pada tahun 2020 balita di Kabupaten Tuban yang sudah mendapatkan imunisasi lengkap (satu kali BCG dan Campak, serta tiga kali untuk DPT, Polio dan Hepatitis B) sebanyak 48,28 persen yang terdiri dari balita laki laki sebanyak 46,72 persen dan balita perempuan sebanyak 49,93 persen. Secara umum dari hasil susenas 2020 balita di Kabupaten Tuban yang sudah mendapatkan imunisasi sesuai dengan jenis imunasinya sebagai mana tercermin dalam gambar dibawah ini.

Gambar 2.5
Persentase Balita yang Pernah Diimunisasi menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Tuban, 2020



Sumber : Susenas 2020 BPS Kabupaten Tuban

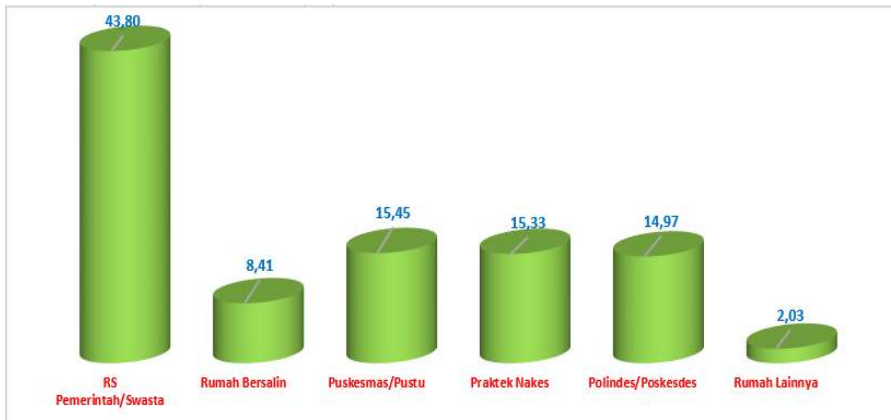
2.3 Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) sangat penting untuk dilakukan. Salah satu caranya adalah menjamin setiap pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan pelayanan *neonatal*, Karena dalam penanganannya mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi SOP kesehatan.

Agar akses pelayanan persalinan oleh petugas medis lebih terjangkau, pemerintah berupaya meningkatkan sarana pelayanan serta tenaga kesehatan yang berkualitas. Satu diantaranya seperti program Bidan Desa, penanganan proses kelahiran oleh tenaga professional dapat menekan angka kematian Ibu dan Bayi. Kesalahan penanganan dalam proses kelahiran dan pasca melahirkan dapat berakibat fatal bagi keselamatan dan kesehatan bayi dikemudian han.

Gambar. 2.6

Persentase Wanita Usia 15–49 tahun yang Pernah Kawin dan Melahirkan Anak pada dua Tahun terakhir menurut Tempat Melahirkan di Kabupaten Tuban, 2020



Sumber : Susenas 2020, BPS Kabupaten Tuban

Persentase kelahiran dengan penolong tenaga medis semakin meningkat persentase perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun di Kabupaten Tuban lebih memilih melahirkan ditempat medis dibandingkan tempat non medis. Hanya 2,03 persen perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan ditempat non medis, sementara tempat melahirkan RS Pemerintah/Swasta/RSIA merupakan pilihan tertinggi yaitu mencapai 43,80 persen, di urutan kedua adalah Puskesmas/Pustu sebesar 15,45 persen, pilihan ketiga persalinan di Praktek Tenaga Kesehatan sebesar 15,33 persen, selanjutnya pilihan keempat dan kelima persalinan di Polindes sebesar 14,97 persen dan di Rumah Sakit Bersalin 8,41 persen

Tabel 2.7

Persentase Wanita Usia 15–49 tahun yang Pernah Kawin dan Melahirkan Anak pada dua tahun terakhir menurut Penolong Kelahiran Terakhir di Kabupaten Tuban, 2020



Sumber : Susenas 2020, BPS Kabupaten Tuban

Banyaknya ibu melahirkan di tempat medis disebabkan makin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penanganan kelahiran sesuai kaidah kesehatan. Disamping itu juga meningkatnya pelayanan kesehatan yang mudah diakses. Hal yang tak kalah penting adalah tersedianya tenaga medis yang makin dipercaya oleh masyarakat. Pada tahun 2020 tercatat proses persalinan terakhir yang ditolong oleh tenaga kesehatan semakin baik yaitu sebesar 100,00 persen, sedangkan penolong tenaga non medis sudah tidak ada lagi 0,00 persen (dukun beranak maupun family lainnya).

Selanjutnya, diketahui bahwa pemanfaatan bidan sebagai penolong terakhir kelahiran masih tetap paling diminati yaitu sebesar 56,78 persen, meningkat dan tahun—tahun sebelumnya selanjutnya tenaga dokter menempati pilihan kedua sebesar 40,31 persen, dan pemilihan tenaga kesehatan lain menjadi pilihan terakhir (2,92 persen).



Badan Pusat Statistik
Kabupaten Tuban

<https://tubankab.bps.go.id>

UHH TUBAN 71,43

ARTINYA BAYI- BAYI YANG DILAHIRKAN MENJELANG
TAHUN 2020 AKAN DAPAT HIDUP SAMPAI USIA 71
HINGGA 72 TAHUN.

TAHUN 2020



3

PENDIDIKAN



3. PENDIDIKAN

Amanat dalam UUD 1945 pasal 31 dan RPJM, menyatakan bahwa Pendidikan merupakan hak setiap warga negara, yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Wajib belajar Sembilan tahun pun mulai diwajibkan kepada semua warga negara khususnya pada penduduk usia sekolah.

Ukuran keberhasilan pembangunan saat ini tidak dapat hanya menggunakan keberhasilan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang dahulu dijadikan sebagai acuan utama keberhasilan pembangunan kewilayahan saat ini tidak lagi dianggap sebagai indikator utama dalam pembangunan kewilayahan. Faktanya beberapa negara dengan pertumbuhan pendapatan nasional yang cukup tinggi namun *Human Development Index* (HDI) masih rendah.

Oleh karena itu disepakati bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya difokuskan pada obyek yang akan dibangun, akan tetapi lebih kepada peran aktif subyek yang terlibat dalam pembangunan. Seperti misalnya pembangunan aspek lingkungan di kota Tuban dimana peran aktif masyarakat dalam ikut menjaga taman—taman merupakan andil yang besar bagi kemajuan kota. Artinya keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari naik turunnya pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tetapi lebih dalam lagi menyangkut pembangunan sumber daya manusianya.

Keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar dimasyarakat tersebut dapat teratasi. Permasalahan—permasalahan tersebut diantaranya adalah kemiskinan, pengangguran, Pendidikan, ketahanan pangan dan penegakan demokrasi.

Kualitas sumberdaya manusia yang handal salah satunya sangat ditentukan oleh Pendidikan, karena Pendidikan merupakan jendela ilmu pengetahuan, sebab itu Pendidikan dianggap memiliki peran strategis yakni sebagai kunci kemajuan bangsa. Peran strategis Pendidikan yaitu sebagai alat yang tidak bisa dipisahkan dalam upaya bahasan terkait

hasil pembangunan Pendidikan adalah melihat indikator— indikatornya, sehingga dapat dijadikan landasan perencanaan pembangunan kedepan. Indikatornya antara lain tingkat partisipasi sekolah, Pendidikan tertinggi yang ditamatkan, rata—rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah dan kualitas pelayanan Pendidikan.

3.1 Tingkat Partisipasi Sekolah

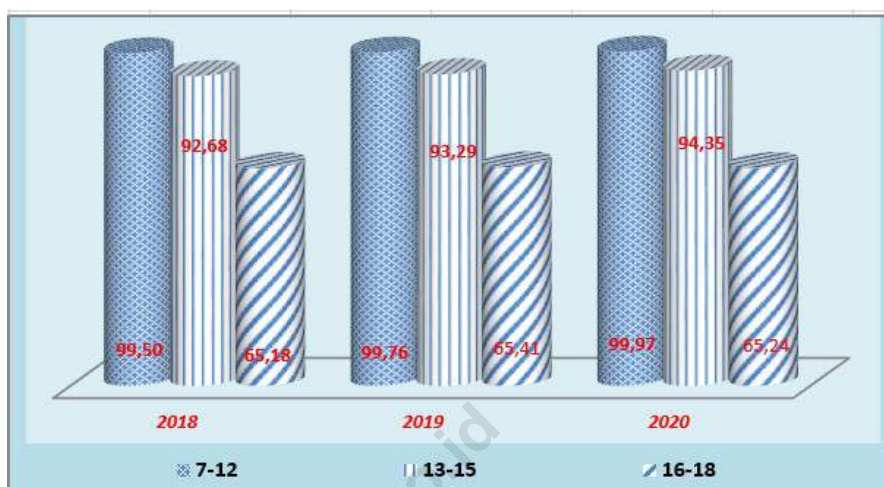
Angka partisipasi sekolah (APS) digunakan sebagai indikator dasar untuk melihat akses penduduk pada fasilitas Pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah, semakin tinggi APS maka semakin besar pula jumlah penduduk yang menikmati bangku sekolah.

APS Kabupaten Tuban pada tahun 2020 untuk kelompok usia 7-12 dan 13-15 tahun tercatat diatas 94 persen, bahkan pada usia jenjang SD mendekati 100 persen (99,97 persen), artinya hampir seluruh anak usia 7-12 tahun bersekolah SD, begitu pula pada kelompok umur 13-15 tahun telah mencapai 94,35 persen menggambarkan bahwa wajib belajar 9 tahun telah berhasil dicapai dengan baik.

Mengapa belum 100 persen ? .. Bias jadi disebabkan faktor pencilan, seperti kemalasan, pengaruh lingkungan, faktor ekonomi dan lain—lain. Pada seluruh kelompok usia angka APS kurang dari 100 persen. Capaian APS pada tingkat pendidikan lanjut lebih rendah dibanding pendidikan tingkat dasar.

Keinginan untuk melanjutkan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi dari wajib belajar 9 tahun harus diimbangi dengan ketersediaan sekolah tingkat lanjutan, dan mudah diakses. Begitu pula dukungan dari masyarakat setempat (budaya), seperti budaya kawin pada usia muda dapat menjadi hambatan anak –anak untuk meneruskan sekolah pada jenjang lanjutan. Pemerintah telah berupaya mendorong peningkatan APS disetiap jenjang usia, melalui program prioritas pemerintah Kabupaten Tuban di bidang Pendidikan diantaranya kejar paket A,B dan C. Di samping itu dibangun juga program pendukung lainnya seperti program Pendidikan usia dini, peningkatan mutu Pendidikan dan pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik, serta program rencana jangka panjang dengan merintis wajib belajar 15 tahun.

Gambar 3.1
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Tuban menurut kelompok Umur ,
2018—2020



Sumber: Susenas BPS Kabupaten Kabupaten Tuban ,

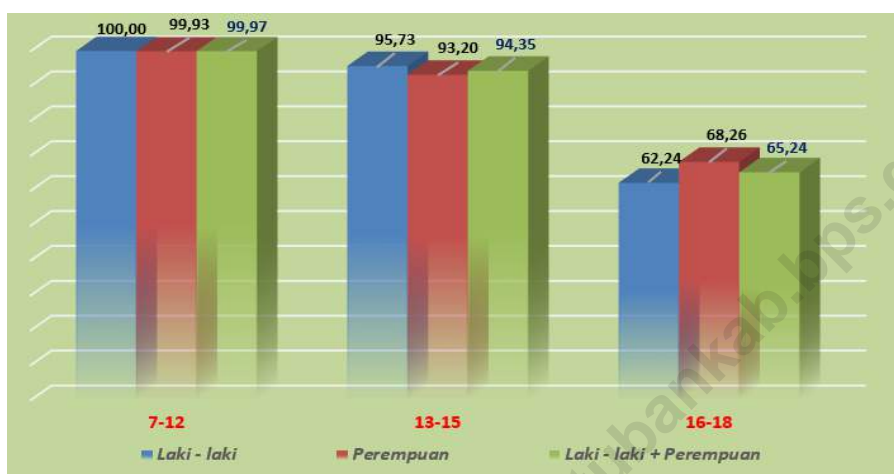
Berdasarkan gender di Kabupaten Tuban capaian APS kelompok usia 7-12 tahun antara laki—laki dibandingkan dengan perempuan lebih tinggi APS Laki—laki demikian juga dengan APS kelompok usia 13-15 tahun sedangkan kelompok usia 16-18 tahun didominasi Perempuan, Hal ini disebabkan masih ada budaya atau kebiasaan dalam keluarga yang mendahulukan Pendidikan laki—laki dibanding anak perempuan. Namun demikian secara umum APS penduduk laki—laki dan perempuan pada masing—masing kelompok usia sekolah tidak berbeda signifikan yang artinya bahwa Pendidikan di Kabupaten Tuban tidak memandang gender, baik penduduk laki—laki maupun perempuan mendapatkan hak yang sama dalam mengakses Pendidikan.

APS Kabupaten Tuban per masing—masing kelompok usia sekolah sebagai berikut APS kelompok usia 7-12 tahun Kabupaten Tuban tahun 2020 sebesar 99,97 persen yang berarti bahwa 99,97 persen penduduk Kabupaten Tuban usia 7-12 tahun mengenyam Pendidikan di sekolah (tanpa memandang tingkatan sekolahnya). APS kelompok usia 13-15 tahun Kabupaten Tuban tahun 2020 sebesar 94,35 persen lebih rendah dari APS kelompok usia 7-12 tahun. Interpretasinya sama dengan sebelumnya, bahwa penduduk Kabupaten Tuban usia 13-15 tahun 94,35 persen memiliki akses terhadap fasilitas Pendidikan di sekolah. Sementara itu, APS kelompok

usia 16-18 tahun Kabupaten Tuban tahun 2020 sebesar 65,24 persen. Angka ini lebih kecil lagi dibandingkan APS kelompok usia 13 - 15 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ada sekitar 34,76 persen penduduk Kabupaten Tuban usia 16-18 tahun tidak melanjutkan lagi ke jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Gambar 3.2

Angka Partisipasi Sekolah menurut kelompok Umur dan Jenis kelamin Kabupaten Tuban , Tahun 2020



Sumber: Susenas 2020, BPS Kabupaten Kabupaten Tuban

Kebijakan pemerintah khususnya di bidang Pendidikan (dibawah SMA/SMK/MA sederajat) merupakan wewenang masing — masing pemerintah daerah (Kabupaten/Kota), sedangkan wewenang pengaturan sekolah menengah atas berada pada pemerintah provinsi yang sudah dimulai beberapa tahun ini, dengan harapan mampu menyelesaikan persoalan ketimpangan Pendidikan penduduk usia 16-18 tahun, dari indikator ini dapat melihat kemampuan masing — masing kabupaten /kota dalam pembangunan Pendidikan dasar.

APS dapat digunakan untuk melihat partisipasi penduduk kelompok usia tertentu dalam Pendidikan formal. Namun APS tidak dapat mengukur ketepatan jenjang Pendidikan yang sedang dijalani kelompok usia tertentu tersebut. Untuk melihat partisipasi penduduk kelompok usia tertentu yang mengenyam Pendidikan formal sesuai dengan kelompok usianya tersebut digunakan indikator Angka Partisipasi Murni (APM).

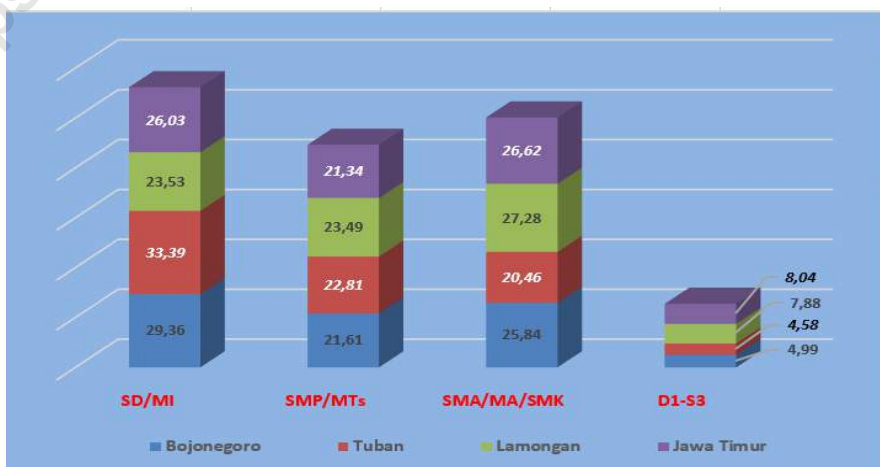
3.2 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Kualitas Sumber Daya Manusia dinilai dapat berpengaruh terhadap produktifitas penduduk, salah satu indikatornya adalah Pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Secara normal intelektual manusia berbanding lurus dengan tingkat Pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat Pendidikan maka diasumsikan semakin luas kemampuan akses terhadap pekerjaan dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan.

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan menjadi kunci untuk menekan jumlah pengangguran yang ada. Berbekal spesifikasi keahlian, setiap penduduk akan mampu bersaing sehat untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang sesuai di bidangnya masing—masing. Diketahui, penduduk usia sekolah di Kabupaten Tuban memiliki minat yang tinggi untuk mengenyam bangku pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi pun mintanya terbilang cukup tinggi, ada lebih dari 50 persen.

Gambar 3.3

Perbandingan Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Kabupaten di Pantura dan Provinsi Jawa Timur 2020



Sumber: Susenas 2020 BPS Provinsi Jawa Timur,

Penduduk Usia 15 tahun keatas di Kabupaten Tuban tahun 2020 yang hanya tamat Sekolah Dasar saja sebanyak 33,39 persen, sekolah menengah pertama mencapai 22,81 persen, selanjutnya tingkat lanjutan atas dan Sekolah menengah kejuruan sebesar 20,46 persen dan hanya sebagian kecil (4,58 persen) yang mampu menyelesaikan Pendidikannya sampai tingkat perguruan tinggi.

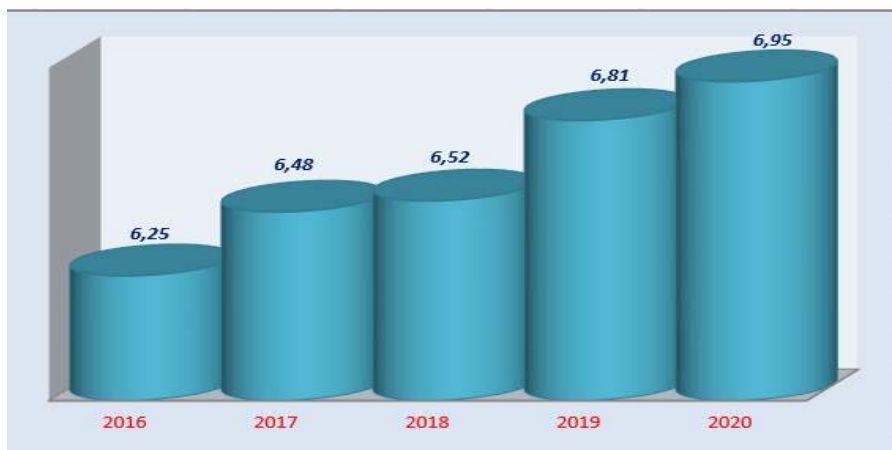
3.3 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah di didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani Pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata—rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata—rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun keatas (sesuai dengan UNDP variable penyusun IPM) semakin tinggi angka RLS maka semakin banyak jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk mengenyam bangku Pendidikan formal. Harapannya semakin lama seseorang mengenyam bangku pendidikan formal, maka tingkat pendidikan yang diselesaikan semakin tinggi.

RLS penduduk usia 25 tahun keatas di Kabupaten Tuban tahun 2020 mencapai 6,95 tahun, meningkat sedikit dari tahun 2019 artinya bahwa secara rata - rata penduduk Kabupaten Tuban yang berusia 25 tahun ke atas mengenyam bangku Pendidikan sekolah selama 6,95 tahun atau setara dengan kelas 1 pendidikan menengah pertama. Tentunya capaian ini masih dibawah target pemerintah dengan program wajib belajar 9 tahun, atau dapat dikatakan sasaran pembangunan wajib belajar yang dicapai baru tingkat Sekolah Dasar. Namun demikian, jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019, rata— rata lama sekolah Kabupaten Tuban mengalami peningkatan dari 6,52 tahun pada 2018 menjadi 6,81 tahun pada 2019 dan pada tahun 2020 menjadi 6,95 tahun.

Gambar 3.4

**Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Kabupaten Tuban
2016-2020**



Sumber: BPS Kabupaten Tuban

Ditinjau dari sudut gender, rata—rata lama sekolah penduduk laki—laki (7,41 tahun) lebih lama dibandingkan dengan penduduk perempuan (6,56 tahun), *gap* antara RLS penduduk laki—laki dan penduduk perempuan semakin melebar karena pada umur 25 tahun keatas perempuan lebih banyak manikah atau bekerja dan tidak melanjutkan Pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dari yang telah ditamatkan.

Di wilayah pantura yang terdiri dari 3 kabupaten diantaranya : Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lamongan merupakan wilayah dengan RLS tertinggi, pada tahun 2020 mencapai 7,92 tahun lebih tinggi dari nilai rata—rata provinsi Jawa Timur diikuti Kabupaten Bojonegoro sebesar 7,33 tahun dan Kabupaten Tuban sebesar 6,95 tahun. Sehingga pemerintah Kabupaten Tuban dalam hal ini perlu memberikan penyadaran kepada penduduk usia 25 tahun keatas agar tetap berminat mengenyam pendidikan formal, misalnya dengan memberikan intensif bagi mereka yang mau sekolah atau pendidikan vokasi.

3.4 Angka Harapan lama Sekolah (HLS)

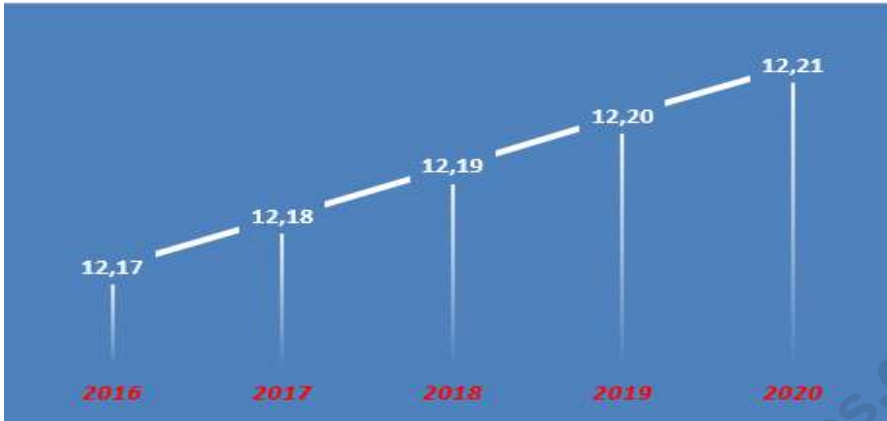
Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan sebagai variabel pendidikan sejak tahun 2010. *United Nation for Development Programs* (UNDP) sudah tidak lagi menggunakan indikator Angka Buta Huruf dan Melek Huruf untuk penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena sudah tidak sensitif lagi dalam menangkap pergerakan persentase penduduk melek huruf antar daerah akibat nilainya yang sudah tinggi (hampir 100 persen).

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur—umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka Harapan lama Sekolah Kabupaten Tuban pada tahun 2020 sebesar 12,21 tahun sedikit meningkat dibanding tahun 2019 (12,20 tahun) Angka tersebut menunjukkan bahwa anak usia 7 tahun

keatas telah menikmati pendidikan. Dengan kata lain program pendidikan 9 tahun yang digadang pemerintah terbukti tercapai dengan baik.

Gambar 3.5
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tuban 2016—2020



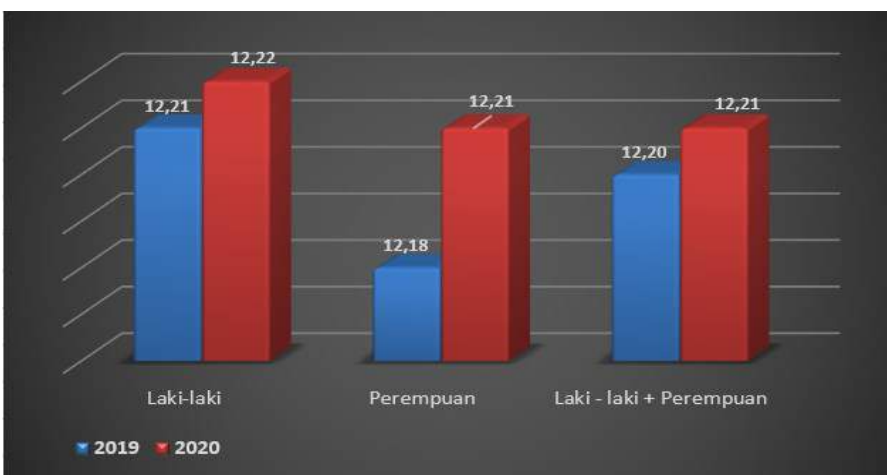
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Selama kurun waktu lima tahun, HLS Kabupaten Tuban terbukti menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2016 HLS kabupaten tuban mencapai 12,17 tahun, kemudian terus meningkat setiap tahunnya sampai dengan menjadi 12,21 tahun pada tahun 2020,

Angka Harapan lama Sekolah dihitng untuk penduduk berusia 7 tahun keatas, HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan system Pendidikan di berbagai jenjang yang ditujukan dalam bentuk lamanya Pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Gambar 3.6

Angka Harapan Lama Sekolah Menurut Gender di Kabupaten Tuban , 2019-2020



Sumber: BPS Kabupaten Tuban

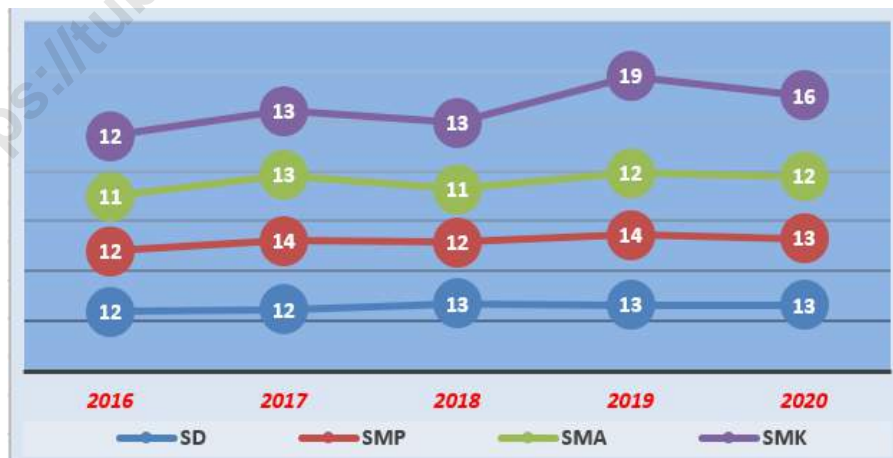
Apabila dilihat berdasarkan gender, angka HLS Laki—laki dan perempuan tidak jauh berbeda. HLS Laki—laki sebesar 12,22 tahun sedangkan untuk perempuan sebesar 12,21 tahun. Fakta tersebut menunjukkan bahwa kesetaraan gender untuk mendapatkan akses pendidikan yang sama juga tercapai.

3.5 Kualitas Pelayanan Pendidikan

Keberhasilan pembangunan di bidang Pendidikan salah satunya ditentukan oleh kualitas pelayanan Pendidikan. Kualitas pelayanan Pendidikan telah menjadi perhatian utama pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia penerus generasi bangsa. Salah satu ukuran kualitas pelayanan Pendidikan dapat dilihat dari rasio murid/guru, rasio guru/sekolah dan rasio murid/kelas. Rasio tersebut untuk melihat seberapa memadai fasilitas sekolah (sekolah/kelas/guru) yang disediakan untuk memenuhi permintaan jasa Pendidikan.

Gambar 3.7

Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tuban 2016—2020



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban

Rasio murid/guru menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Tuban pada tahun 2020 semakin besar, selang 12 hingga 16. Artinya, seorang guru memiliki tanggungjawab mendidik dan mengajar 12-16 orang siswa. Rasio ini relatif dapat dikatakan beban seorang guru dalam mendidik dan mengajar di sekolah telah cukup dengan asumsi satu kelas biasanya 20 sampai 30 orang siswa yang harus ditanggung.

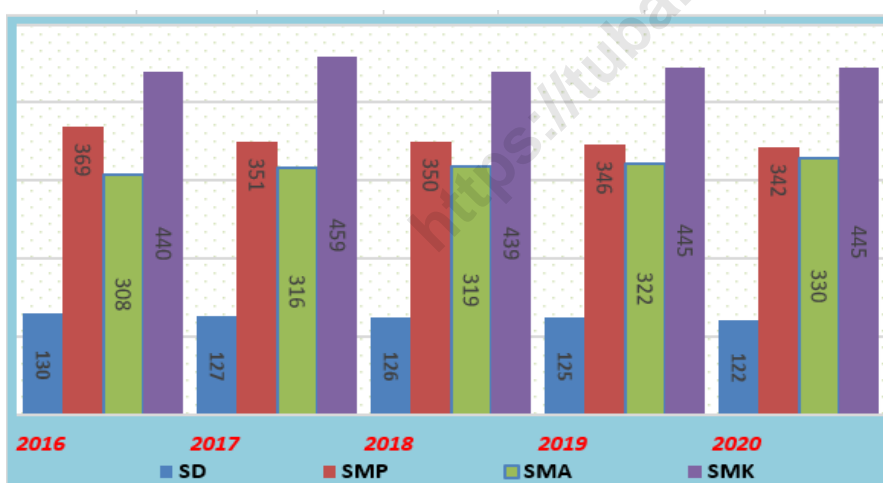
Rasio murid terhadap guru yang terus mengalami penurunan sejak 2016 hingga 2020 menunjukkan bahwa beban tanggungjawab

guru terus menurun seiring dengan pengkaderan guru baru melalui pengadaan tenaga pendidik setiap tahunnya.

Selain pembangunan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik, Pemerintah Kabupaten Tuban juga terus melakukan pembenahan bidang pendidikan melalui pembangunan infrastruktur sekolah, baik jenjang pendidikan dasar, menengah maupun perguruan tinggi. Sebagai ukuran kualitas pembangunan itu, digunakanlah angka rasio murid-sekolah

Dari tahun 2016 hingga 2020, terlihat bahwa rasio murid-sekolah pendidikan SD fluktuatif dan cenderung menurun, begitu pula dengan rasio murid-sekolah pada jenjang pendidikan menengah pertama (SMP). Pada tahun 2016, rasio murid-sekolah untuk SD sebesar 130 kemudian menjadi 122 pada tahun 2020, sedangkan untuk SMP pada tahun 2016 sebesar 369 menjadi 342 di tahun 2020.

Gambar 3.8
Rasio Murid - Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tuban
2016—2020



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban

Sebaliknya, rasio murid-sekolah untuk jenjang pendidikan menengah atas (SMA) dan pendidikan menengah kejuruan (SMK) terlihat adanya peningkatan. Pada tahun 2016, rasio murid-sekolah untuk SMA sebesar 308 kemudian menjadi 330 pada tahun 2020, sedangkan untuk SMK sebesar 440 pada tahun 2016 menjadi 445 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa daya serap pendidikan paling tinggi di Kabupaten Tuban adalah jenjang SMA dan SMK.

Rasio murid-sekolah jenjang SMA dan SMK yang tinggi menunjukkan bahwa daya serap jenjang SMA dan SMK begitu besar.

Ditambah dengan kemungkinan adanya siswa yang pindah wilayah atau cross border dari luar Kabupaten Tuban.

Sedangkan untuk jenjang SMK, rasio murid-sekolah juga jauh lebih pesat dibandingkan SMA. Orientasi terhadap dunia kerja semakin diminati, apalagi dengan luasnya lapangan pekerjaan yang ada di Kabupaten Tuban khususnya dan Jawa Timur pada umumnya di saat ini. Rasio murid-sekolah pada tahun 2020 terlihat konstan, yakni sebesar 445. Artinya, setiap sekolah SMK memiliki jumlah murid sebanyak 445 orang.

Pemerintah Kabupaten Tuban dalam hal ini perlu tetap meningkatkan minat belajar murid supaya daya serap sekolah terhadap murid semakin meningkat. Dengan menerapkan program beasiswa serta menerapkan program pendidikan vokasi pada jenjang SMA maupun SMK diharapkan pada waktunya mampu mencetak generasi andal dan berdaya saing di dunia kerja.



Badan Pusat Statistik
Kabupaten Tuban



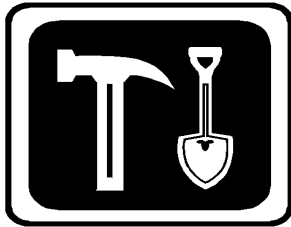
Hanya
4,58%

PENDUDUK TUBAN USIA 15 TAHUN KEATAS TAHUN
2020 YANG MAMPU MENYELESAIKAN
PENDIDIKANNYA SAMPAI TINGKAT PERGURUAN
TINGGI



4

KETENAGAKERJAAN



4. KETENAGAKERJAAN

Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat menjadi sasaran pembangunan ideal suatu daerah.

Disinilah letak isu pentingnya faktor ketenagakerjaan ikut berperan dalam sebuah aktifitas bisnis dan perekonomian unggulan Kabupaten Tuban. Ketenagakerjaan masih menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam menerapkan strategi dan langkah tepat untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah.

Faktor penyebab bertambahnya tingkat pengangguran di Tuban disebabkan oleh adanya kesenjangan antara supply tenaga kerja yang tersedia dengan demand atau kebutuhan perusahaan / usaha, minimnya informasi tentang tenaga kerja yang tersedia maupun kebutuhan dunia usaha dari sisi kualitas tenaga kerja.

Tenaga kerja merupakan modal bagi geraknya roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Karena itu pentingnya data mengenai perkembangan ketenagakerjaan sangatlah penting bagi pemerintah terkait dalam pengambil kebijakan yang tepat sasaran.

Bab ini akan memberikan gambaran mengenai beberapa indikator ketenagakerjaan yang bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) kondisi tahun 2016-2020. Indikator tersebut, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk bekerja menurut lapangan usaha dan jumlah jam kerja, serta persentase pekerja menurut kelompok upah, gaji / pendapatan bersih.

4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas)

yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Sedangkan definisi “Bekerja” adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu, termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam kegiatan ekonomi.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja/ usia produktif yaitu 15 tahun ke atas. Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja dikenal pula indikator untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja.

Angka TPAK dan TPT bisa mengindikasikan potensi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah serta besarnya persentase angkatan kerja yang tidak produktif. Makin tinggi angka TPAK maka produktifitas suatu daerah semakin baik, begitu pula sebaliknya. Biasanya wilayah dengan TPAK tinggi maka TPT yang rendah

Gambar 4.1
Jumlah Angkatan Kerja,
Kabupaten Tuban 2017-2020
(Ribuan Orang)



Sumber : BPS Kabupaten Tuban

Tabel 4.1
Penduduk Kabupaten Tuban Usia 15 Tahun ke atas menurut Jenis Kegiatan Utama,
2017 - 2020

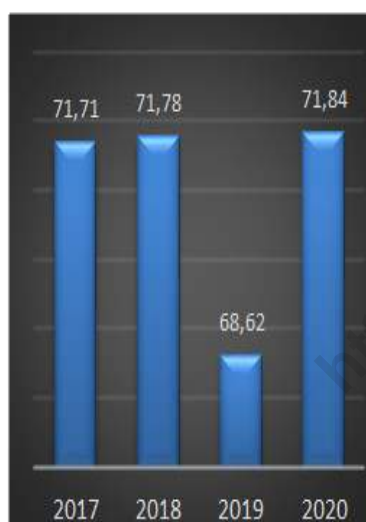
Jenis Kegiatan Utama	Satuan	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Angkatan Kerja (AK)	Orang	653.981	659.499	634.883	677.759
a. Bekerja	Orang	631.783	640.855	617.347	645.156
b. Menganggur	Orang	22.198	18.644	17.536	32.603
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	71,71	71,78	68,62	71,84
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,39	2,83	2,76	4,81

Sumber : BPS Kabupaten Tuban

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Tuban pada tahun 2020 sebesar 677,7 ribu orang, naik sebanyak 42,8 ribu orang dibandingkan tahun 2019. Perkembangan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Tuban selama 2017-2020 dapat dilihat pada table 4.1 diatas.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Tuban pada tahun 2020 tercatat mencapai angka 71,84 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 68,62 persen meningkat tipis sebesar 3,22 persen poin. Salah satu penyebabnya karena adanya peningkatan jumlah angkatan kerja, sehingga berdampak pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Tuban. Secara umum angka ini menunjukkan bahwa 71,84 persen penduduk Kabupaten Tuban yang berusia 15 tahun ke atas memutuskan untuk ikut aktif di pasar kerja. Sedangkan 28,16 persen sisanya memutuskan untuk fokus sekolah, mengurus rumah tangga, maupun memiliki kegiatan di luar kegiatan ekonomi seperti kaum lanjut usia (lansia).

Gambar 4.2
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tuban, 2017-2020



Sumber: BPS Kabupaten Tuban

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tuban pada tahun 2020 sebesar 4,81 persen naik jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 2,76 persen. Selama periode 2017-2020 TPT Kabupaten Tuban terus menurun menunjukkan bahwa optimisme kondisi ekonomi telah berdampak positif bagi sendi-sendi kehidupan masyarakat Kabupaten Tuban. TPT tahun 2019 merupakan terendah selama empat tahun terakhir.

Banyak hal yang bisa diindikasikan sebagai penyebab bertambahnya jumlah pengangguran di Kabupaten Tuban, antara lain adanya kesenjangan antara *supply* tenaga kerja yang tersedia dengan *demand* atau kebutuhan perusahaan/usaha, minimnya informasi tentang tenaga kerja yang tersedia maupun kebutuhan dunia usaha dari sisi kualitas tenaga kerja, disamping itu selama tahun 2020 adanya pandemic Covid-19, dengan pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial berskala Besar) yang diterapkan pemerintah secara nasional maupun daerah yang membatasi aktifitas dan gerak masyarakat dalam berkeaktifitas baik secara social ataupun ekonomi, yang berdampak pada menurunnya permintaan pasar (barang/jasa) yang menyebabkan produksi turun dan berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat berkurangnya produksi, sehingga pengangguran juga naik.

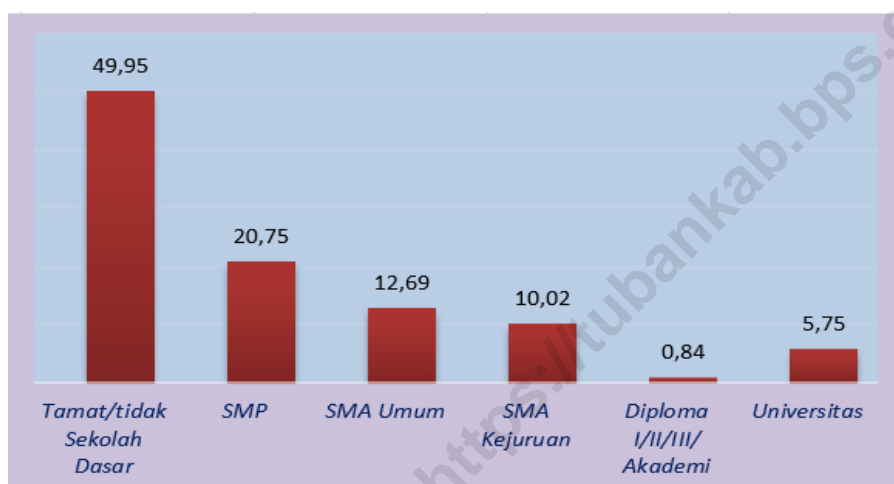
Kualitas tenaga kerja merupakan modal besar bagi capaian produksi, salah satu indikatornya tercermin dari kualitas pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja di Kabupaten Tuban. Disamping ketrampilan perlunya tingkat pendidikan untuk masuk ke pasar kerja

agar mampu bersaing, terutama dari serbuan pekerja dan luar negeri.

Pendidikan yang ditamatkan oleh para Angkatan Kerja Kabupaten Tuban pada tahun 2020 didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar (SD) sebesar 49,95 persen disusul tamatan SLTP 20,75 persen, dan urutan ketiga tamatan SLTA yaitu sebesar 12,69 persen, dan tamatan SMK sebesar 10,02 persen, selanjutnya tamatan Universitas sebesar 5,75 persen dan tamatan Diploma 0,84 persen. Banyaknya angkatan kerja yang berpendidikan rendah menjadi hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah,

Gambar 4.3

**Angkatan Kerja menurut Pendidikan yang ditamatkan.
2020**



Sumber : BPS Kabupaten Tuban

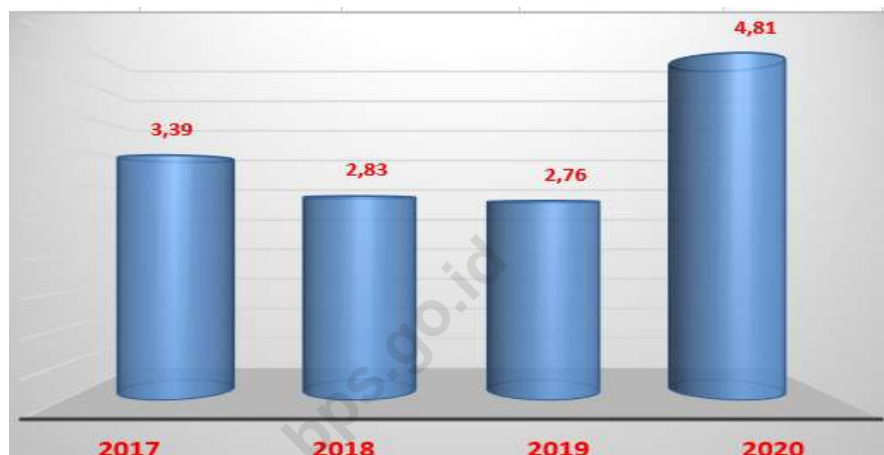
4.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pembangunan ekonomi suatu daerah bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini dapat tercapai bila masyarakat mempunyai akses terhadap pendapatan (pekerjaan). Salah satu gambaran tingkat kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat didapat dari besaran tingkat pengangguran terbuka. Pengangguran bisa menyebabkan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga berdampak pada masalah sosial.

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tuban mengalami kenaikan sebesar 2,05 persen poin pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019, yaitu sebesar 2,76 persen pada tahun 2019 naik menjadi 4,82 persen pada tahun 2020 dan terbesar selama lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan adanya pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh

perusahaan kecil menengah sampai dengan perusahaan multi nasional karena dampak dari pandemic Covid-19 sehingga terjadi kenaikan pengangguran.

Gambar 4.4
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tuban, 2017-2020



Sumber : BPS Kabupaten Tuban

Bila dihubungkan dengan tersedianya angkatan kerja menurut pendidikan yang ditamatkan, maka jumlah angkatan kerja yang tidak pernah sekolah atau tidak lulus SD, lulusan SD dan SLTP lebih dari separuh angkatan kerja (70,70 persen). Fenomena ini dapat dijadikan pemikiran Pemerintah untuk menggaet investor yang mau membuka industri-industri pertanian atau non pertanian yang bersifat padat karya dengan tenaga kerja berkecakupan dasar.

TPT menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2020 diketahui bahwa pengangguran paling besar adalah tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 10,91 persen. Oleh karena itu perlu pengkajian mengapa pada jenjang lulusan SMK yang pada umumnya adalah tenaga-tenaga trampil justru paling banyak menganggur. Hal ini tidak sesuai dengan program pemerintah "SMK Bisa" yang selama ini disosialisasikan. Perlu pendataan lebih lanjut berapa banyak lulusan SMK tiap tahun sesuai dengan jurusannya, dan berapa lapangan pekerjaan yang dapat diakses oleh mereka. Peringkat kedua TPT adalah jenjang pendidikan DIV/S1/S2/S3 sebesar 10,38 persen, selanjutnya jenjang pendidikan D1/D2/D3 sebesar 9,13 persen, kemudian tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA) sebesar 8,51 persen, sedangkan jenjang SMP sebesar 4,54 persen.

Penganggur dengan TPT terendah ada pada tingkat pendidikan SD kebawah yaitu sebesar 2,04 persen, rendahnya pengangguran pada tingkat SD kebawah disebabkan jumlah angkatan kerja pada level ini paling sedikit jumlahnya dan jenis pekerjaan yang dilakukan biasanya informal atau pekerjaan kasar yang banyak tersedia dan mudah diakses (biasanya sektor pertanian).

Tabel 4.2

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang di tamatkan Kabupaten Tuban, 2017—2020 (persen)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>Tamat/tidak Sekolah Dasar</i>	1,52	1,06	0,67	2,04
<i>SLTP</i>	3,85	6,29	2,40	4,54
<i>SLTA Umum</i>	9,55	4,16	8,19	8,51
<i>SLTA Kejuruan</i>	6,61	6,48	7,47	10,91
<i>Diploma I/II/III/ Akademi</i>	13,39	0,00	0,00	9,13
<i>Universitas</i>	0,00	0,00	5,44	10,38
Total	3,39	2,83	2,76	4,81
SLTA +	6,93	3,87	7,09	9,72

Sumber : BPS Kabupaten Tuban

TPT penduduk dengan pendidikan Diploma/Akademi mengalami kenaikan yang cukup signifikan sejak tahun 2018—2020, dari 0,00 persen menjadi 9,13 persen demikian juga TPT lulusan pendidikan setara S1, S2 dan S3 cenderung naik, pada tahun 2018 sebesar 0,00 persen meningkat menjadi sebesar 5,44 persen pada tahun 2019 dan terus naik pada tahun 2020 menjadi 10,38 persen. Pada level Diploma/Akademi pengangguran lebih kecil jika dibandingkan dengan tamatan SMA/SMK, diduga banyak perusahaan memilih membayar karyawan dengan pendidikan dan kemampuan yang lebih tinggi dari SMA namun dengan gaji tak setinggi tingkat sarjana.

Angka TPT yang mengalami penurunan mengindikasikan bahwa jumlah masyarakat yang bekerja dan mempunyai pendapatan semakin bertambah dibandingkan tahun sebelumnya, dengan kata lain terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Peningkatan TPT berarti jumlah penduduk yang menganggur semakin bertambah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Tuban merupakan salah satu kabupaten/kota yang angka TPT nya di bawah rata - rata angka TPT Provinsi Jawa Timur.

4.3. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dibagi menjadi 3 sektor lapangan usaha yaitu Sektor **Primer** yaitu terdiri dari Pertanian (Pertanian, kehutanan dan perikanan) pertambangan dan penggalian, Sektor **Sekunder** (industri pengolahan, listrik, gas dan air serta konstruksi) dan Sektor **Tersier** (perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel, angkutan, pergudangan, komunikasi, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan, serta jasa kemasyarakatan).

Pada tahun 2020 secara umum penduduk yang bekerja pada sektor primer sebesar 250,9 ribu orang. Sedangkan yang bekerja pada sektor sekunder dan tersier masing-masing sebesar 133,7 ribu orang dan 260,5 ribu orang. Lapangan usaha sektor tersier pada kondisi tahun 2019-2020 menjadi lapangan usaha terbesar yang menyerap penduduk bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa selain faktor musiman juga terjadi pergeseran komposisi tenaga kerja dari lapangan pekerjaan ke arah sektor tersier.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja selama seminggu yang lalu Menurut kelompok Lapangan Usaha, Kabupaten Tuban, 2017-2020 (ribu Orang)

Kelompok Usaha	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sektor Primer	260,7	274,5	246,4	250,9
Sektor Sekunder	154,1	139,4	123,9	133,7
Sektor Tersier	216,9	226,9	246,9	260,5
Jumlah	631,7	640,8	617,2	645,1

Sumber : BPS Kabupaten Tuban

Sektor primer yang berupa lapangan usaha pertanian tentunya jumlah tenaga kerja yang terserap sangat bergantung pada faktor musiman, sementara pada tahun 2020 terjadi pandemic Covid-19 dan

juga musim kemarau yang agak panjang dimana pekerjaan pertanian banyak berkurang, sehingga para pekerja pada kategori ini begeser pada sektor lain, sebelum ada pandemic Covid-19 biasanya mereka merantau ke kota dan bekerja pada bidang jasa, dan bidang lain pada sektor tersier, saat ini banyak yang beralih ke bidang perdagangan yang dilakukan secara online.

Status pekerjaan formal dan informal dari penduduk yang bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Ada enam kategori status pekerjaan utama, pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan, sisanya dikategorikan sebagai pekerja pada pekerjaan informal. Dari tabel diatas dapat diketahui, di Kabupaten Tuban pada tahun 2020 terdapat 194.039 orang (30,08 persen) bekerja pada kegiatan formal dan 451.117 orang (69,92 persen) bekerja pada kegiatan informal. Bila ditinjau dari aspek gender maka Laki-laki lebih banyak menjadi pekerja formal (130.964 orang) dibandingkan perempuan (63.075 orang), begitu pula pada sektor informal laki-laki lebih banyak (255.966 orang) dibanding perempuan (195.151 orang).

Tabel 4.4

Jumlah Penduduk berumur 15 Tahun ke atas menurut Status Pekerjaan Utama, Kabupaten Tuban 2017 - 2020 (orang)

Status Pekerjaan Utama	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kegiatan Formal	189.699	190.239	190.795	194.039
Berusaha Dibantu Buruh Tetap	24.464	20.551	20.928	21.971
Buruh/ Karyawan	165.235	169.688	169.867	172.068
Kegiatan Informal	442.084	450.616	426.552	451.117
Berusaha Sendiri	106.020	87.148	106.176	84.585
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap	120.507	148.140	143.623	167.857
Pekerja Bebas	106.214	97.939	83.093	77.915
Pekerja Keluarga	109.343	117.389	93.660	120.760
Jumlah	631.783	640.855	617.347	645.156

Sumber : BPS Kabupaten Tuban

4.4. Jumlah Jam Kerja

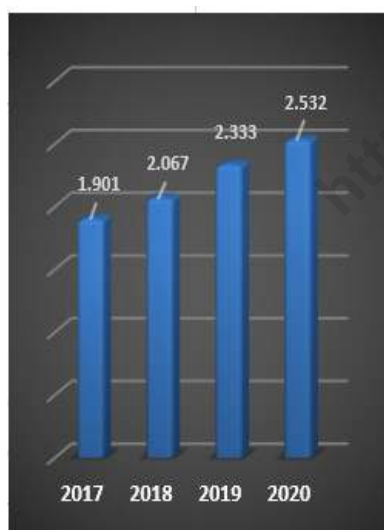
Pekerja yang bekerja jauh di bawah jam kerja rata-rata selama seminggu (kurang dari 35 jam) dikategorikan sebagai pengangguran terselubung. Biasanya pekerja semacam ini memiliki pendapatan di bawah kemampuan sebenarnya. Selain itu pula seseorang yang bekerja di bawah 35 jam merupakan orang-orang yang mempunyai kemampuan tetapi tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, keahlian atau ketrampilannya. Sementara itu pekerja yang dikategorikan sebagai bukan setengah pengangguran adalah mereka yang memiliki jumlah jam kerja normal selama seminggu (minimal 35 jam).

4.5. Upah/ Gaji/ Pendapatan Bersih

Balas jasa yang diberikan pada pekerja sebagai imbalan atas jasa yang diberikan selama proses memproduksi barang atau jasa pada suatu perusahaan disebut dengan upah/gaji. Melalui ukuran upah/gaji yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik itu sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya bisa dijadikan tolok ukur kehidupan dikatakan layak atau tidak.

Berdasarkan Gambar 4.7 dapat kita lihat rata-rata upah/gaji bersih sebulan di Kabupaten Tuban secara umum terjadi kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 rata-rata upah per bulannya meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya berdasarkan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Pada tahun 2017—2020 rata-rata upah/gaji bersih yang diterima oleh buruh/karyawan selama sebulan ada kenaikan sebanyak 10,04 persen pertahunnya.

Gambar 4.5
Rata-rata Upah/Gaji Bersih Buruh/
Karyawan di Kabupaten Tuban
(ribuan rupiah)
2017—2020



Sumber: Pemprov Jawa Timur



Badan Pusat Statistik
Kabupaten Tuban

TPT* 2020 MENINGKAT 2,05%

Hal ini disebabkan karena adanya PHK oleh perusahaan kecil menengah sampai dengan perusahaan multi nasional karena dampak dari pandemi covid - 19

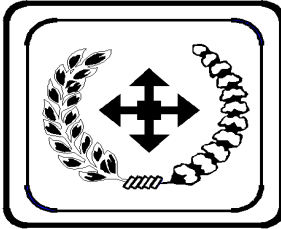
**Tingkat Pengangguran Terbuka*





5

**TARAF DAN POLA
KONSUMSI**

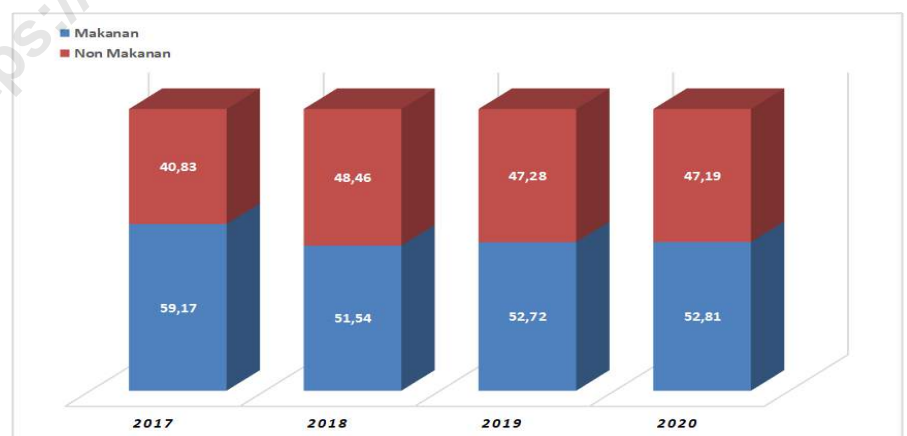


5. TARAF DAN POLA KONSUMSI

Konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan demi menjaga kelangsungan hidup. Konsumsi penduduk dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor demografi dan faktor lain. Faktor ekonomi dipengaruhi antara lain pendapatan, tingkat suku bunga dan kekayaan; faktor demografi dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan komposisi penduduk sedangkan faktor lain dipengaruhi oleh kebiasaan adat istiadat dan gaya hidup seseorang. Pada umumnya konsumsi penduduk dipengaruhi oleh besarnya pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula konsumsi yang mereka keluarkan. Bisa diartikan bahwa konsumsi seseorang berbanding lurus dengan pendapatannya. Sehingga bisa dikatakan bahwa pola konsumsi menjadi indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga.

Gambar 5.1

Percentase Pengeluaran perkapita Sebulan menurut jenis pengeluaran di Kabupaten Tuban 2017—2020



Sumber: BPS Kabupaten Tuban

5.1. Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut alokasi penggunaannya, yaitu pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran untuk bukan makanan. Struktur konsumsi penduduk Kabupaten Tuban tahun 2020 sedikit berbeda dibanding tahun 2019. Pada tahun 2019, konsumsi makanan tercatat sebesar 52,72 persen atau sebesar Rp. 477.949,66 per kapita per bulan, sedangkan untuk pengeluaran

konsumsi non makanan tercatat sebesar 47,28 persen atau sebesar Rp. 428.685,67 per kapita per bulan. Pada tahun 2020, konsumsi makanan secara prosentase naik menjadi 52,81 persen tetapi nominalnya turun, menjadi sebesar Rp. 470.367,- per kapita per bulan. Sedangkan pengeluaran atau konsumsi non makanan juga mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 420.257,- per kapita per bulan atau 47,19 persen dari total seluruh pengeluaran.

Dari seluruh barang/jasa yang dikonsumsi, terbanyak pada komponen makanan jadi atau 34,36 persen dari total pengeluaran makanan, diikuti pengeluaran untuk padi-padian (13,32 persen) dan pengeluaran untuk tembakau dan sirih (12,61 persen). Sementara pengeluaran terkecil tercatat pada komponen pengeluaran umbi-umbian dan konsumsi lainnya masing-masing sebesar 0,43 persen dan 1,54 persen.

Tabel 5.1

Nilai Pengeluaran Makanan Penduduk menurut Jenis Pengeluaran, di Kabupaten Tuban , 2020 (rupiah)

Jenis Pengeluaran	Nilai	Prosentase
(1)	(2)	(3)
Padi-Padian	62.642	13,32
Umbi-Umbian	2.036	0,43
Ikan	32.433	6,90
Daging	16.340	3,47
Telur dan Susu	20.775	4,42
Sayur-Sayuran	35.742	7,60
Kacang-Kacangan	11.671	2,48
Buah-Buahan	21.902	4,66
Minyak dan Lemak	13.915	2,96
Bahan Minuman	13.579	2,89
Bumbu-Bumbuan	11.143	2,37
Konsumsi Lainnya	7.255	1,54
Makanan dan Minuman jadi	161.627	34,36
Tembakau dan Sirih	59.307	12,61
Total	470.367	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Tuban ,

Sepertiga pengeluaran makanan digunakan untuk pembelian makanan jadi. Ini menunjukkan pola konsumsi semakin mengarah pada budaya praktis. Beberapa rumah tangga lebih memilih makanan jadi

sebagai prioritas. Kondisi ini juga didukung semakin banyaknya ragam kuliner dengan harga yang terjangkau.

Pada kelompok pengeluaran non makanan terbanyak pada pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah sebesar 44,59 persen dari total pengeluaran non makanan. Pengeluaran non makanan terbesar kedua dan ketiga tercatat pada pengeluaran aneka barang dan jasa (24,86 persen) dan pengeluaran barang tahan lama (16,11 persen). Pengeluaran komponen keperluan pesta dan upacara merupakan pengeluaran terkecil atau sebesar 2,58 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penghasilan rumah tangga maka semakin tinggi pula pengeluaran bukan makanan

Dari survei tendensi konsumen, pengeluaran pakaian, alas kaki dan tutup kepala umumnya mencapai puncaknya pada saat Ramadhan, Idul Fitri dan menjelang tahun baru. Disamping itu, komponen keperluan pesta yang tercatat terendah dalam pengeluaran non makanan, pada masa Ramadan dan Idul Fitri, juga mencapai puncaknya. Hal ini bisa dimengerti pada masa pasca Lebaran atau bulan Syawal, biasanya dilaksanakan acara pesta hajatan seperti khitanan dan pernikahan.

Tabel 5.2

Nilai Pengeluaran Non Makanan Penduduk menurut Jenis Pengeluaran, di Kabupaten Tuban , 2020 (rupiah)

Jenis Pengeluaran	Nilai	Prosentase
(1)	(2)	(3)
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	187.380	44,59
Aneka Barang Dan Jasa	104.478	24,86
Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	23.250	5,53
Barang Tahan Lama	67.716	16,11
Pajak dan Asuransi	26.599	6,33
Keperluan Pesta dan Upacara	10.834	2,58
Total	420.257	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Tuban ,

5.2. Ketimpangan Pengeluaran Penduduk

Penduduk antar wilayah tidak hanya berbeda dalam hal besarnya pengeluaran, tetapi juga berbeda dalam hal pola konsumsi.

Hal ini dikarenakan perbedaan pada besar kecilnya pendapatan yang diperoleh oleh berbagai lapisan penduduk. Perbedaan ini bisa menimbulkan kesenjangan yang berakibat pada ketimpangan tingkat kemakmuran antara penduduk pedesaan dan penduduk perkotaan.

Ketimpangan pendapatan bisa didekati dari hasil indeks Gini untuk nilai pengeluaran tersebut. Nilai dari indeks ini berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin rendah, sebaliknya semakin mendekati 1 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin tinggi. Dengan kata lain, semakin besar indeks Gini, semakin timpang pengeluaran penduduk di wilayah tersebut.

Selain ketimpangan menurut Indeks Gini, ketimpangan juga bisa dilihat dari distribusi pemerataan pendapatan versi Bank Dunia. Menurut kriteria Bank Dunia penduduk digolongkan menjadi tiga kelas yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi.

Masih menurut Bank Dunia, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk terpusat pada 40 persen penduduk berpendapatan terendah. Jika tingkat ketimpangan pendapatan penduduk diperoleh angka kurang dari 12 persen maka dianggap tinggi, 12 persen hingga 17 persen dianggap sedang, dan di atas 17 persen dianggap rendah.

Baik Indeks Gini maupun pemerataan pendapatan versi Bank Dunia data berdasarkan pengeluaran sebagai pendekatan untuk data pendapatan.

5.3. Konsumsi Energi dan Protein

Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia, rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2.150 kkal (kilo kalori) dan 57 gram protein per hari.

Pada tahun 2019 penduduk Kabupaten Tuban mampu mengonsumsi energi/kalori rata-rata per hari sebesar 2.218,23 kkal dan pada tahun 2020 turun sebesar 36,54 kkal menjadi 2.181,69 kkal. Ini berarti konsumsi energi per hari penduduk Kabupaten Tuban di tahun 2020 walaupun mengalami penurunan masih memenuhi syarat kecukupan gizi yang ditentukan yaitu sebesar 2.150 kkal.

Sementara itu, rata-rata konsumsi protein per kapita per hari penduduk Kabupaten Tuban relatif tinggi yaitu dari 67,30 gram pada tahun 2019, kemudian turun 2,01 gram menjadi 65,29 gram pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kecukupan protein penduduk Kabupaten Tuban sesuai dengan yang disyaratkan yaitu di atas 57 gram per hari

Kecukupan konsumsi energi dan protein bagi penduduk sudah melebihi dari rata-rata kecukupan energi dan protein yang disyaratkan. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Tuban sudah memperhatikan mengenai kebutuhan asupan energi dan protein yang diperlukan bagi anggota keluarganya dan kesehatan tubuh.



Badan Pusat Statistik
Kabupaten Tuban



KABUPATEN TUBAN 2020

Persentase Pengeluaran perkapita Sebulan

52,81 % MAKANAN

47,19% NON MAKANAN





6

**PERUMAHAN DAN
LINGKUNGAN**



6. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Salah satu kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia adalah adanya rumah tinggal. Selain merupakan kebutuhan yang mendasar, rumah tinggal juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah sebagai tempat tinggal juga mempunyai pengaruh terhadap produktivitas kerja seseorang karena selain sebagai tempat tinggal atau hunian juga berfungsi sebagai tempat pusat pendidikan, pembinaan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Keadaan perumahan yang baik dapat menunjang usaha pembangunan ekonomi, karena dengan kualitas kehidupan yang layak melalui pemenuhan kebutuhan tempat tinggal maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Undang - Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik di kota maupun di daerah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Status sosial seseorang juga dapat ditunjukkan melalui kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik. Salah satu fasilitas perumahan yang dapat mencerminkan kesejahteraan adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan. Selain itu, juga memenuhi fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

6.1. Kualitas Rumah Tinggal

Secara umum rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal seperti memiliki lantai, dinding dan atap yang memenuhi syarat, serta mempunyai luas lantai yang mencukupi/ sebanding dengan banyaknya orang yang tinggal di dalamnya, termasuk fasilitas penerangan, air minum dan tempat pembuangan akhir/tinja. Selain itu kualitas bangunan tempat tinggal dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi dari penghuninya. Rumah dengan bangunan yang kualitasnya baik tentunya kondisi ekonominya juga lebih baik dibandingkan mereka yang menempati rumah dengan kualitas bangunan yang rendah.

Berdasarkan data Susenas 2016-2020, persentase rumah tangga di Kabupaten Tuban yang memiliki rumah berlantaikan bukan tanah menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2016, rumah yang berlantaikan bukan tanah sebesar 70,19 persen naik menjadi sebesar 76,81 persen pada tahun 2017 dan terus naik menjadi sebesar 77,94 persen (2018) dan sebesar 83,42 persen (2019) namun pada tahun 2020 turun menjadi sebesar 81,52 persen. Persentase rumah tangga yang memiliki rumah bukan tanah terus meningkat hal ini menunjukkan peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Tuban, hanya saja pada tahun 2020 turun bersamaan dengan adanya pandemic Covid-19.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat kualitas rumah tinggal adalah penggunaan atap dan dinding terluas. Selama empat tahun terakhir 2017 - 2020 rumah tempat tinggal dengan atap beton, genteng, sirap dan asbes di Kabupaten Tuban sudah mencapai 100 %

Pada tahun 2020 kualitas perumahan di Kabupaten Tuban jika dilihat dari indikator dinding terluas tembok dan kayu telah menurun menjadi sebesar 95,39 persen dibanding tahun 2019 sebesar 96,26 persen.

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m². Sedangkan Kategori rumah sehat (menurut Kemenkes, 2005), adalah rumah yang memiliki luas lantai minimum 8 m² perkapita,

mempunyai kualitas bangunan yang baik, berada dalam lingkungan yang bersih dan bebas dari polusi, serta memiliki penataan ventilasi yang cukup untuk keluar masuknya udara dan sinar matahari.

Tabel 6.1.
Prosentase Rumah Tangga menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, di Kabupaten Tuban, 2016- 2020

Indikator Kualitas Perumahan	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lantai bukan tanah (%)	70,19	76,81	77,94	83,42	81,52
Atap beton, genteng, sirap dan asbes (%)	99,81	100	100	100	100
Dinding terluas tembok dan kayu (%)	93,61	92,66	93,42	96,26	95,39

Sumber: Susenas BPS Kabupaten Tuban

6.2. Fasilitas Rumah Tinggal

Fasilitas rumah tinggal seperti ketersediaan air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik merupakan faktor yang menentukan kualitas dan kenyamanan rumah tinggal. Salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari adalah air, sehingga ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan dikonsumsi dan sanitasi merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Di Kabupaten Tuban, penggunaan air minum sangat beragam, tergantung dengan ketersediaan akses terhadap sarana air minum, kondisi sosial ekonomi dan kondisi geografis di masing-masing kecamatan/desa. Gaya hidup penduduk dalam mengonsumsi air minum sudah bergeser, hal ini terlihat dari indikator rumah tangga yang mengonsumsi air kemasan, air isi ulang dan air dari ledeng.

Dengan menjamurnya toko - toko yang menjual air minum dalam kemasan, depo isi ulang dan juga program pemerintah daerah untuk menyalurkan air ledeng sampai ke pelosok—pelosok desa sehingga mempengaruhi penduduk Kabupaten Tuban dalam hal mengonsumsi air minum, baik kemasan bermerk, Isi ulang atau air ledeng. Persentase rumah tangga yang mengonsumsi tiga sumber air minum di atas setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Pada tahun 2020, rumah tangga yang menggunakan air minum dari ketiga sumber tersebut mencapai 59,76 persen naik dibandingkan tahun 2019 sebesar 59,55 persen.

Tabel 6.2.
Persentase Rumah Tangga menurut beberapa Fasilitas Perumahan, di Kabupaten Tuban, 2016 - 2020

Indikator Fasilitas Perumahan	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Air kemasan, air isi ulang & ledeng	45,27	50,92	57,54	59,55	59,76
Jamban sendiri	70,10	75,16	74,08	80,63	80,18
Jamban sendiri dengan tangki septik	45,43	78,44	90,27	86,37	92,56
Sumber penerangan listrik	99,80	99,51	100,00	100,00	100,00

Sumber: *Siusenas BPS Kabupaten Tuban*

Fasilitas perumahan yang cukup penting peranannya dalam usaha sanitasi adalah penyediaan sarana jamban. Jika dilihat dari segi kesehatan lingkungan dan masyarakat, masalah pembuangan kotoran manusia dapat mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat.

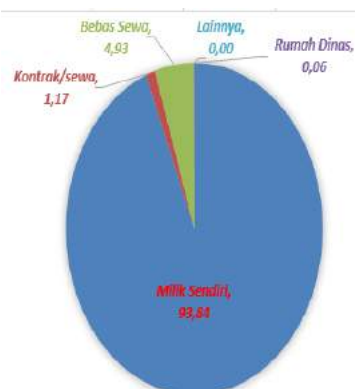
Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik. Pada tahun 2020, rumah tangga yang menggunakan jamban dengan tangki septik sudah mencapai 92,56 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 sebesar 86,37 persen.

Sumber penerangan merupakan fasilitas perumahan yang penting. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan Non PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan dengan sumber penerangan lainnya. Rumah tangga di Kabupaten Tuban yang telah menikmati fasilitas penerangan listrik tahun 2020 sebanyak 100,00 persen yang bersumber dari listrik PLN.

6.3. Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat yaitu status

Gambar 6.1.
Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal, di Kabupaten Tuban, 2020



Sumber: Susenas BPS Kabupaten Tuban

kepemilikan rumah tinggal, Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak/sewa, bebas sewa, rumah dinas, atau status rumah kepemilikan lainnya, Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri akan lebih tenang dibandingkan mereka yang menempati rumah sewa apalagi yang bebas sewa karena telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil Susenas 2020, rumah tangga di Kabupaten Tuban yang menempati rumah milik sendiri sebesar 93,84 persen dan sisanya sebesar 6,16 persen adalah bukan milik sendiri. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri terdiri dari kontrak/sewa sebesar 1,17 persen, bebas sewa sebesar 4,93 persen, rumah dinas dan lainnya masing-masing sebesar 0,06 persen dan 0,00 persen.

Tabel 6.3.

Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal, di Kabupaten Tuban, 2016 - 2020

Indikator Fasilitas Perumahan	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Milik Sendiri	96,83	96,08	92,18	95,23	93,84
Kontrak/sewa	0,47	1,39	2,05	1,53	1,17
Bebas Sewa	2,59	2,39	5,13	3,24	4,93
Rumah Dinas	0,00	0,14	0,11	0,00	0,06
Lainnya	0,12	0,00	0,53	0,00	0,00

Sumber: Susenas BPS Kabupaten Tuban



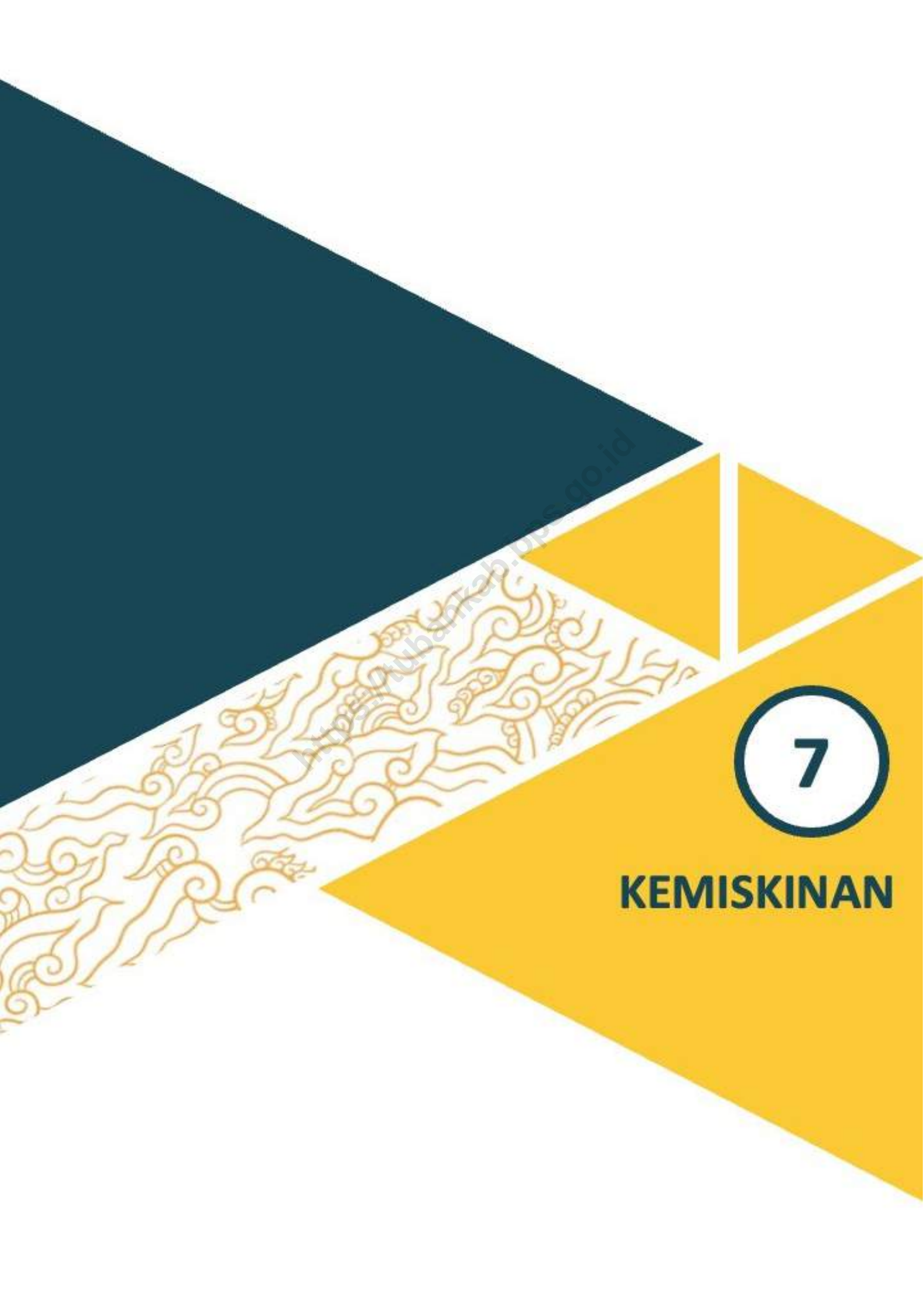
**Badan Pusat Statistik
Kabupaten Tuban**

80,18%

RUMAH TANGGA MEMILIKI
JAMBAN SENDIRI



92,56% DIANTARANYA
MEMILIKI TANGKI SEPTIK



7

KEMISKINAN



7. KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan suatu kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dan perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Kemiskinan telah menjadi masalah klasik yang dialami oleh setiap negara. Permasalahan ini harus dilihat dari berbagai aspek karena kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang tidak hanya berhubungan dengan kondisi ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya.

Oleh sebab itu, penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu agenda penting di setiap negara. Di Indonesia, tiap era kepemimpinan memiliki program khusus untuk pengentasan kemiskinan. diantaranya program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang bertujuan menanggulangi permasalahan ketersediaan infrastruktur di desa—desa yang relatif belum maju, pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) serta penetapan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu fokus utama pemerintah sebagaimana tertuang dalam sembilan agenda prioritas Nawa Cita. Dalam Nawa Cita terdapat empat strategi dasar yang telah ditetapkan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan yaitu menyempurnakan program perlindungan sosial, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang inklusif.

Yang dimaksud dengan pembangunan yang inklusif yaitu pembangunan dengan kecepatan ekonomi yang tinggi disertai penyerapan tenaga kerja yang cukup luas, naiknya pendapatan per kapita daerah, naiknya pembangunan manusia, berkurangnya jumlah pengangguran terbuka, berkurangnya jumlah penduduk miskin, meningkatnya penyerapan teknologi dan informasi, naiknya daya beli

masyarakat, serta pembangunan yang ramah lingkungan sesuai rencana tata ruang wilayah daerah.

7.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Tuban

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka memenuhi kebutuhan - kebutuhan dasar warga negara, diperlukan langkah -langkah strategis dan komprehensif (TNP2K, 2014). Pemerintah Kabupaten Tuban sebagaimana tertuang dalam misinya, Kabupaten Tuban yang lebih Religius, Bersih, Maju dan Sejahterah, telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Tuban. Pemerintah terus meningkatkan dan menyempurnakan berbagai program penanggulangan kemiskinan, terutama program Bantuan Sosial Terpadu, Program Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan pelatihan dan ketrampilan serta meningkatkan pemberdayaan usaha ekonomi Mikro dan Kecil bagi rumah tangga miskin melalui pemberian bantuan modal usaha dan kemudahan akses modal.

Gambar 7.1
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tuban, 2016-2020



Sumber: BPS Republik Indonesia

Tabel 7.1

Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Tuban, 2016-2020

Indikator Kemiskinan	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	198,35	196,1	178,64	170,8	187,13
Persentase Penduduk Miskin (%)	17,14	16,87	15,31	15,58	15,91

Sumber: BPS Republik Indonesia

Selama tahun 2016 - 2020, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tuban cenderung menurun seiring banyaknya program pengentasan kemiskinan yang digalakkan oleh pemerintah. Pada 2016 penduduk miskin Tuban sebesar 17,14 persen, kemudian turun sebesar 0,36 poin persen menjadi 16,87 persen tahun 2017. Penurunan ini terus berlanjut sampai dengan tahun 2018 menjadi 15,31 persen pada tahun 2019 naik sebesar 0,27 poin persen sehingga penduduk miskin Tuban sebesar 15,58 persen dan pada tahun 2020 naik lagi menjadi 15,91 persen.

Jumlah penduduk miskin Tuban yang terus menurun selama tiga tahun terakhir dan kembali naik walaupun tidak signifikan namun belum mengubah posisi Tuban sebagai wilayah kabupaten dengan persentase rumah tangga miskin terbanyak ke lima se Provinsi Jawa Timur.

Salah satu faktor yang mempengaruhi persentase penduduk miskin pada tahun 2020 ini naik adalah adanya pandemic Covid-19 dan pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang diterapkan pemerintah secara Nasional maupun Daerah yang membatasi setiap aktifitas dan gerak masyarakat, sehingga lapangan usaha yang dijalankan sangat terbatas jumlahnya maka Sektor yang mendominasi adalah pertanian yang mempunyai produktifitas rendah dibanding sektor-sektor lainnya. Sebagian besar penduduk miskin di Kabupaten Tuban bekerja di sektor pertanian. Sektor ini sangat bergantung pada kondisi iklim dan rentan terhadap hama. Akibat produktivitas usaha pertanian yang rendah, pendapatan rumah tangga tani pun turut menjadi rendah, sehingga muncul kantong-kantong kemiskinan. Disamping itu, faktor sumber daya manusia juga memberikan pengaruh yang tidak sedikit. Untuk yang ber-SDM rendah, umumnya bekerja di sektor informal dengan imbalan yang rendah pula sehingga kemiskinan dominan terjadi di sektor informal.

7.2 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Garis Kemiskinan merupakan batas yang digunakan untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Tuban mengalami peningkatan antar waktu selama 2016 - 2020. Pada tahun 2016 garis kemiskinan Kabupaten Tuban sebesar Rp. 294.543,- dan terus meningkat hingga mencapai Rp. 371.465,- pada tahun 2020.

Kemiskinan harus dipandang secara luas agar dalam implementasi kebijakannya dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Kemiskinan bukan hanya persoalan banyaknya penduduk miskin, tetapi juga seberapa besar jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (tingkat kedalaman) yang disebut

sebagai P_1 , dan keragaman pengeluaran antar penduduk miskin (P_2).

Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) Tuban mencapai 3,03 pada tahun 2016 kemudian naik 0,26 poin menjadi 3,29 pada tahun 2017. P_1 kembali turun pada tahun 2018, sebesar 0,74 poin, menjadi 2,55 pada tahun 2019 naik lagi sebesar 0,29 poin menjadi 2,84 dan pada tahun 2020 kembali turun sebesar 0,57 poin menjadi 2,27.

Indeks keparahan kemiskinan (P_2) Kabupaten Tuban memiliki pola yang serupa dengan indeks kedalaman kemiskinan (P_1). Pada tahun 2016 P_2 Tuban sebesar 0,82 dan naik 0,09 poin pada tahun 2017 P_2 menurun menjadi 0,91. Pada tahun 2018 P_2 kembali turun sebesar 0,26 poin menjadi 0,65, pada tahun 2019 menjadi 0,75 dan kembali turun pada tahun 2020 menjadi sebesar 0,48. Nilai P_2 yang cenderung turun ini menandakan ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin semakin kecil.

Tabel 7.2
Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1), dan
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2) Kabupaten Tuban,
2016-2020

Indikator Kemiskinan	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)	3,03	3,29	2,55	2,84	2,27
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2)	0,82	0,91	0,65	0,75	0,48
Garis Kemiskinan	294.543	308.822	328.268	348.503	371.465

Sumber: BPS Republik Indonesia

Karakteristik rumah tangga miskin dapat dilihat dari kondisi pendidikan dan ketenagakerjaan dari anggota rumah tangga, serta kondisi perumahan rumah tangga. Pemahaman mengenai karakteristik rumah tangga miskin penting sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan agar lebih tepat sasaran.

7.3 Karakteristik Pendidikan Anggota Rumah Tangga

Pembahasan mengenai kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari pendidikan. Kemiskinan lekat dengan tingkat pendidikan yang rendah. Pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehingga jika kesempatan menikmati pendidikan dimiliki oleh anggota rumah tangga

miskin, maka kemungkinan untuk keluar dari kemiskinan di masa yang akan datang akan semakin besar.

Tabel 7.3
Karakteristik Pendidikan penduduk miskin, Kabupaten Tuban, 2016- 2020

Karakteristik Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Angka Melek Huruf					
a. 15 - 24 Tahun	97,50	99,58	99,57	99,79	100,00
b. 15 - 55 Tahun	93,87	94,48	94,34	97,03	96,99
2 Angka Partisipasi Sekolah					
a. 7 - 12 Tahun	99,83	99,21	99,5	99,76	99,97
b. 13 - 15 Tahun	93,65	93,13	92,68	93,29	94,35
3 Pendidikan yang Ditamatkan (15 +)					
a. Tidak Tamat SD	21,52	20,64	18,22	18,16	15,86
b. Tamat SD dan SLTP	59,75	59,67	57,10	57,26	57,95
c. Tamat SLTA ke atas	18,73	19,69	24,68	24,58	26,19

Sumber: BPS Republik Indonesia

Karakteristik pendidikan penduduk miskin di Kabupaten Tuban semakin membaik setiap tahun seiring gencarnya program pendidikan yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan masyarakat, khususnya penduduk miskin. Dan hasil Susenas 2020, diperoleh data bahwa Angka Melek Huruf (AMH) yang merupakan indikator yang menunjukkan proporsi penduduk miskin yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana, mengalami penurunan tipis.

AMH penduduk miskin di Kabupaten Tuban selama 2020 pada kelompok umur 15-24 tahun naik pada posisi puncak sebesar 100 persen, sedangkan pada kelompok umur 15—55 turun tipis sebesar 0,04 poin menjadi 96,99 persen.

Bagi penduduk miskin, melek huruf menjadi suatu hal yang krusial. Kemampuan membaca untuk penduduk usia produktif sangat diperlukan untuk bisa bersaing di dunia kerja. Penduduk miskin meski mempunyai AMH relatif baik, tetapi umumnya masih sebatas membaca saja. Pendidikannya tidak setinggi penduduk yang tidak miskin. Tentunya itu terkait kemampuan dalam memperoleh pendidikan yang cukup menguras sumber keuangan mereka.

Angka partisipasi sekolah (APS) penduduk miskin tercatat cukup baik. Pada tahun 2020, APS penduduk miskin umur 7-12 tahun tercatat sebesar 99,97 persen. Angka ini jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 99,76 persen. Demikian juga pada kategori umur 13-15 tercatat sebesar 94,35 persen lebih baik dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 93,29 persen. Kenyataan tersebut menunjukkan penduduk miskin semakin sadar pentingnya pendidikan. Pendidikan sendiri semakin dibutuhkan dalam dunia kerja. Hanya penduduk dengan SDM baik yang mempunyai peluang besar bersaing di dunia usaha.

Pada era industri 4.0 ini pendidikan menjadi syarat wajib bagi kemajuan suatu wilayah. Pekerjaan sudah tidak hanya didominasi lagi oleh tenaga manusia, tetapi juga sudah mengadopsi komputer dan robot. Oleh karena itu, ke depannya SDM tidak hanya ditingkat dengan menaikkan indikator AMH dan APS, tetapi juga diimbangi dengan peningkatan kemampuan IT agar mampu bersaing di era industri 4.0. Tidak terkecuali, penduduk miskin harus melek IT untuk bisa bersaing dalam dunia kerja.

Menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan, pada tahun 2019 terdapat sekitar 57,26 persen penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Tuban yang tamat SD dan SLTP, kemudian meningkat menjadi 57,95 persen pada tahun 2020. Kondisi ini masih lebih rendah dibanding tahun 2016 yang mencapai 59,75 persen. Yang lebih menggembirakan, penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tamat SLTA ke atas pada tahun 2019 mencapai 24,58 persen, kemudian meningkat menjadi 26,19 persen pada tahun 2020. Capaian pada tahun 2020 merupakan terbaik selama lima tahun terakhir. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan penduduk miskin semakin baik, dan memberikan peluang yang lebih luas bagi penduduk miskin untuk memilih lapangan usaha yang diinginkan.

Sementara itu, penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak tamat SD, selama lima tahun terakhir 2016 - 2020 terus mengalami penurunan di setiap tahunnya. Dari 21,52 persen pada tahun 2016 turun menjadi sebesar 15,86 persen pada tahun 2020

7.4 Karakteristik Ketenagakerjaan Anggota Rumah Tangga

Beberapa ahli menyatakan pengangguran merupakan awal dari kemiskinan, meskipun untuk membuktikannya secara empiris tidaklah mudah. Pengangguran menyebabkan seseorang tidak memiliki pendapatan sehingga kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan pada akhirnya menjauhkannya dari akses pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak.

Penduduk miskin identik dengan pendidikan dan keterampilan yang rendah, sehingga berpengaruh pada pemilihan jenis pekerjaan.

Jika dilihat berdasarkan lapangan pekerjaan, persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian cenderung lebih besar dibanding penduduk miskin yang bekerja bukan di sektor pertanian. Penduduk miskin Kabupaten Tuban yang bekerja di sektor pertanian relatif besar karena di Kabupaten Tuban merupakan daerah konsentrasi dan potensi pertanian sehingga banyak tenaga kerja yang terserap di sektor tersebut demikian juga dari segi keahlian pun dalam sektor pertanian penduduk tidak begitu dituntut harus memiliki suatu keahlian khusus dalam bidang tertentu.

7.5 Karakteristik Perumahan Rumah Tangga

Karakteristik perumahan merupakan karakteristik rumah tangga miskin yang tidak kalah penting untuk dibahas. BPS menggunakan delapan variabel perumahan untuk mendefinisikan rumah tangga miskin, yaitu luas lantai perkapita, jenis lantai, ketersediaan air bersih, jenis jamban, kepemilikan aset, pendapatan, pengeluaran, dan konsumsi lauk pauk (daging, ikan, telur, ayam).

Adanya keterbatasan untuk melakukan kegiatan di dalam rumah yang sempit menandakan kualitas hidup yang lebih rendah dibandingkan dengan rumah tangga yang lebih leluasa beraktivitas di dalam rumah (TNP2K, 2010). Rumah tangga miskin cenderung memiliki luas lantai perkapita lebih kecil.

Penggunaan air bersih berkaitan dengan kualitas hidup seseorang. Air bersih sangat dibutuhkan untuk kebutuhan minum dan sanitasi. Air minum yang tidak terjamin kebersihannya berbahaya bagi kesehatan karena dapat menimbulkan penyakit. Ketika kepala rumah

tangga atau ada anggota rumah tangga yang sakit, pengeluaran untuk berobat akan semakin menambah beban rumah tangga tersebut yang pada akhirnya semakin mendorong ke tingkat kemiskinan yang semakin dalam (TNP2K, 2010). Air bersih yang dicakup di sini adalah air kemasan bermerk, air isi ulang, air ledeng, sumur bor/pompa, dan sumur/mata air terlindung.

Karakteristik perumahan yang tidak kalah penting untuk melihat karakteristik rumah tangga miskin adalah penggunaan jamban sendiri/bersama. Ketersediaan tempat buang air besar (jamban) di rumah tangga merupakan salah satu syarat hidup sehat. Sebagai mana penggunaan air bersih, penggunaan jamban sendiri/bersama pada rumah tangga miskin di Kabupaten Tuban tidak jauh berbeda bila dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin.

<https://tubankab.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik
Kabupaten Tuban

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN NAIK 1.33 POIN

Hingga tahun 2020, terdapat 187.13
ribu penduduk miskin di Kabupaten
Tuban



tubankab.bps.go.id



[bpstuban](#)



8

SOSIAL LAINNYA



8. SOSIAL LAINNYA

8.1. Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kegiatan

Menurut kegiatannya, penduduk usia 15 tahun ke atas dibagi menjadi lima kelompok besar yaitu penduduk yang bekerja, pengangguran, sekolah, mengurus rumah tangga dan melakukan kegiatan lainnya.

Penduduk Kabupaten Tuban usia 15 tahun ke atas yang kegiatan seminggu terakhir bekerja tercatat sebanyak 68,38 persen. Bekerja yang dimaksud disini adalah melakukan kegiatan bekerja minimal satu jam berturut turut yang menghasilkan nilai ekonomis dalam seminggu terakhir baik sebagai pengusaha, pekerja dibayar maupun pekerja tidak dibayar (pekerja keluarga).

Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang melakukan kegiatan bekerja paling banyak dibandingkan dengan kegiatan lainnya. Terbanyak kedua adalah penduduk yang mengurus rumah tangga atau sebesar 18,97 persen. Sebagian besar yang mengurus rumah tangga adalah ibu rumah tangga dan penduduk lansia (lanjut usia).

Gambar 8.1

Persentase Penduduk Kabupaten Tuban menurut Kegiatan, 2020



Sumber: BPS Kabupaten Tuban

Distribusi penduduk ketiga adalah penduduk yang melakukan kegiatan sekolah, kegiatan utamanya bersekolah sebesar 5,70 persen. Bersekolah yang dimaksud adalah menjalani pendidikan formal mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi,

Selanjutnya adalah penduduk yang melakukan kegiatan Lainnya seperti penduduk yang tidak melakukan kegiatan apapun, karena sudah pensiun dan atau yang cacat jasmani sebanyak 3,49 persen dan yang terakhir adalah pengangguran atau tidak melakukan kegiatan apapun, punya pekerjaan tetapi untuk sementara tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan. sebanyak 3,46 persen

8.2. Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi

Hal yang tak kalah menarik untuk diketahui yaitu seberapa jauh perkembangan kesejahteraan rakyat dengan melihat penguasaan/ kepemilikan akses teknologi informasi dan komunikasi.

Di abad ke 20 ini, kemajuan teknologi informasi berkembang cepat. Era penggunaan telepon sudah bergeser ke *hand phone* (HP). Bagi masyarakat sekarang, HP lebih praktis dan ekonomis dibanding telepon. Memiliki HP tidak memerlukan biaya pemasangan dan tidak tergantung adanya sarana kabel telepon. Cukup dengan tower sinyal, penggunaan HP bisa dilakukan di mana saja.

Di samping itu, pembelian pulsa HP bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing individu. Bahkan hanya dengan perangkat HP, siapapun bisa melakukan akses internet dengan tujuan yang lebih luas.

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2020, penduduk yang menggunakan telepon selular (HP) sebesar 65,15 persen, naik sekitar 2 poin dibanding tahun sebelumnya. Pengguna HP meningkat karena seseorang bisa melakukan komunikasi lewat aplikasi sosial media seperti facebook, whatshap, Line, lmo, Instagram dan lain sebagainya, yang kesemuanya tidak bisa dinikmati pengguna telepon biasa. Begitu cepatnya perkembangan tekndogi informasi, dari tahun ke tahun pengguna HP semakin banyak. Ibaratnya, jika tidak mau ketinggalan informasi di era milenial ini, perlu menguasai alat komunikasi, paling tidak telepon selular dengan berbagai fitur canggih.

Sementara dari data tersebut tercatat bahwa yang memiliki atau menguasai HP tercatat 53,69 persen, juga naik 2 poin dibanding tahun sebelumnya. Persentase pengguna HP lebih tinggi dibanding yang menguasai atau memiliki HP karena, beberapa di antaranya hanya

Gambar 8.2
Persentase Penduduk Kabupaten Tuban menurut Penggunaan HP, 2020



Sumber: BPS Kabupaten Tuban

menggunakan untuk hal-hal tertentu seperti pembelian tiket online atau untuk keperluan sekolah seperti ujian dan pendaftaran sekolah online. Dengan semakin berkembangnya teknologi komunikasi, diperkirakan yang memiliki/menguasai HP semakin meningkat di tahun-tahun mendatang.

Kelebihan lainnya, untuk daerah-daerah terpencil yang tidak mempunyai jaringan telepon, rumah tangga bisa melakukan komunikasi melalui HP berkat adanya tower signal di daerah tersebut.

Di era digital, penggunaan internet semakin vital dari seluruh penduduk yang menguasai komputer, sebanyak 76,00 persen diketahui pernah mengakses internet dengan berbagai tujuan, meningkat sekitar 10 persen dibanding tahun sebelumnya. Ini mengindikasikan bahwa kebutuhan Internet dari tahun ke tahun semakin meningkat, masyarakat semakin melek teknologi informasi. Umumnya mereka menggunakan untuk bersosial media melalui aplikasi Whatshap, Twitter, instagram, Line dan Facebook. Diperkirakan kebutuhan internet ini semakin meningkat di masa mendatang.

Sekitar 41,71 persen pengguna internet mengaksesnya dari rumah sendiri. Tempat umum yang menyediakan wifi gratis tercatat penggunaannya sekitar 10 persen, sedangkan pengguna internet untuk keperluan sekolah sebesar 19,64 persen. Tiga tujuan utama menggunakan internet di Kabupaten Tuban yaitu media sosial, membaca berita, dan untuk hiburan, masing-masing 91,95 persen, 58,67 persen dan 72,11 persen. Pemanfaatan Internet dengan tujuan e-commerce dan e-banking relatif masih rendah di bawah 7 persen.

Gambar 8.3
Persentase Penduduk Kabupaten Tuban yang memanfaatkan internet, 2020



Sumber: BPS Kabupaten Tuban

Gambar 8.4
Persentase Penduduk yang memanfaatkan internet menurut Tujuannya di Kabupaten Tuban, 2020



8.3. Akses Kredit Usaha dan Penerima Pelayanan Kesehatan

Untuk meningkatkan produktivitas usaha masyarakat, banyak tersedia kredit usaha dari pemerintah dan swasta. Bahkan untuk mendukung usaha mikro kecil dan menengah, Pemerintah Kabupaten Tuban khususnya dan secara umum program dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan program kredit usaha rakyat (KUR) dengan prosedur yang mudah dan bunga yang relatif murah.

Terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR), tidak sedikit masyarakat yang masih minim pengetahuannya tentang kredit usaha. Akibatnya, di antaranya terjebak pada rentenir dan sistem ijon. Sosialisasi KUR juga dirasakan minim. Hal ini menyebabkan rumah tangga yang memanfaatkan kredit usaha tidak begitu banyak.

Di Kabupaten Tuban jenis pembiayaan yang mulai berkembang seiring dengan program pemerintah daerah adalah Kredit Usaha Rakyat lebih menonjol dibandingkan dengan perusahaan pembiayaan lainnya sehingga peran usaha koperasi sedikit tergeser

Namun demikian yang terjadi di masyarakat Kabupaten Tuban dalam pemanfaatan kredit usaha lebih sering menggunakan penerima kredit usaha dari perseorangan dengan bunga dan jenis pemberian kredit lainnya dimana masing - masing mencapai 2,43 persen dan 8,00 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Tuban meminjam uang kepada individu atau seseorang untuk usaha menjadi hal yang sudah biasa. Padahal resiko meminjam kepada individu atau perseorangan cukup beresiko karena kebanyakan berbunga tinggi. Meskipun demikian ada kecenderungan meminjam uang secara individu atau kepada perseorangan untuk usaha masih menjadi alternatif favorit.

Gambar 8.5



Selain adanya program kredit usaha, program kesejahteraan rakyat di Kabupaten Tuban juga melalui pemberian pelayanan kesehatan gratis.

Jaminan pelayanan kesehatan di Kabupaten Tuban sangat dirasakan oleh masyarakat, mengingat biaya berobat di rumah sakit umum dan swasta termasuk membeli obat masih relatif mahal.

Di Kabupaten Tuban sendiri, untuk meringankan biaya berobat bagi warga miskin selain dari program layanan kesehatan yang berasal dari pemerintah dan swasta, juga terdapat lembaga sosial lainnya yang turut menyediakan pembiayaan kesehatan gratis. Lembaga sosial tersebut bisa dalam bentuk LSM, aktivitas layanan orsos/orpol, maupun yang disediakan oleh lembaga keagamaan.

8.4. Tindak Kejahatan

Kebebasan individu dari kejahatan merupakan salah satu bagian dari kesejahteraan rakyat. Semakin sejahtera suatu wilayah, semakin aman masyarakatnya dari tindak kejahatan.

Pada tahun 2020 tercatat penduduk Kabupaten Tuban yang mengalami tindak kejahatan kurang dari 1 persen. Kejahatan yang dimaksud meliputi pencurian, penganiayaan, perampokan, pelecehan seksual, dan kejahatan lainnya.



Badan Pusat Statistik
Kabupaten Tuban

berdasarkan susenas maret 2020, 65.15% penduduk menggunakan telepon seluler (HP)

53.69% diantaranya
memiliki/menguasai HP



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TUBAN**

Jl. Manunggal No. 08 Tuban Telp. 0356-321974

e-mail : bps3523@bps.go.id